

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang penting untuk dikembangkan. *United Nation World Tourism Organizations* (UNWTO) mengakui bahwa sektor pariwisata adalah sektor unggulan (*tourism is a leading sector*) dan merupakan salah satu kunci penting untuk pembangunan wilayah di suatu negara dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan sektor pariwisata tengah digencarkan di hampir seluruh daerah di Indonesia mengingat target kunjungan wisata wisatawan mancanegara di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 17 juta, sehingga diharapkan dapat mendukung kesiapan destinasi menerima kunjungan wisatawan. Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Gunn (1988), mendefinisikan pariwisata sebagai aktivitas ekonomi yang harus dilihat dari dua sisi yakni sisi permintaan (*demand side*) dan sisi pasokan (*supply side*). Lebih lanjut dia mengemukakan bahwa keberhasilan dalam pengembangan pariwisata di suatu daerah sangat tergantung kepada kemampuan perencanaan dalam mengintegrasikan kedua sisi tersebut secara berimbang ke dalam sebuah rencana pengembangan pariwisata.

Pemerataan pembangunan pariwisata menjadi hal yang sedang diupayakan pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pariwisata. Bali yang selalu menjadi

andalan sehingga pengembangan pariwisata hanya berfokus pada Bali. Sekarang ini pemerintah ingin menciptakan “Bali-Bali yang lain” dengan melakukan percepatan pembangunan pada 10 DPP (Destinasi Pariwisata Prioritas) yakni Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Taman Wisata Candi Borobudur, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Pulau Morotai, dan Taman Nasional Wakatobi. Sedangkan empat destinasi pariwisata dalam proses perkembangan dan telah mencapai lebih dari 90 persen, yaitu Danau Toba (95 persen), Borobudur (97,1 persen), Bromo Tengger Semeru (92,9 persen), dan Wakatobi (97,2 persen). Penetapan 10 destinasi prioritas merupakan amanat Presiden melalui surat Sekretariat Kabinet Nomor B 652/Seskab/Maritim/2015 tanggal 6 November 2015 perihal Arahan Presiden Republik Indonesia mengenai Pariwisata dan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Awal Tahun pada tanggal 4 Januari 2016. Pemerintah menyadari bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat potensial untuk menumbang devisa negara, sehingga percepatan pembangunan di 10 DPP ini perlu dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk mencapai target pariwisata sebagai penyumbang devisa utama di Indonesia pada tahun 2019 dan 2020.

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam pengembangan pariwisata harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan daerah harus saling bersinergi demi tercapainya tujuan yaitu pengembangan pariwisata yang sebaik-baiknya. Pemerintah pusat telah memberi jalan bagi pemerintah daerah untuk dapat berperan aktif dalam pengembangan wisata dengan adanya otonomi daerah yang menghasilkan kondisi dimana setiap daerah memiliki keleluasaan

untuk mengembangkan dan mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pemerintah daerah diberi kebebasan untuk berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya tanpa melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini akan cenderung menghasilkan kompetisi positif dimana setiap daerah akan berlomba-lomba untuk melakukan pengembangan pariwisata yang lebih unggul dibandingkan daerah lainnya.

Pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Indonesia. Jawa Tengah yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang daya tarik dan potensi wisata yang sangat baik juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 tentang Kepariwisata sebagai wujud keseriusan dalam pengembangan pariwisata di Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah memiliki letak geografis yang sangat strategis berada di tengah-tengah Pulau Jawa menjadikan Jawa Tengah ini mempunyai daya tarik wisata yang kuat untuk menarik wisatawan untuk berkunjung baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal ini dapat terlihat dari tabel jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang datang ke Jawa Tengah berikut ini:

Tabel 1. 1 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Wisatawan				Jumlah Total
	M mancanegara	Persentase	Domestik	Persentase	
2014	419.584	1,39%	29.852.095	98,61%	30.271.679
2015	375.166	1,18%	31.432.080	98,82%	31.807.246
2016	578.924	1,54%	36.899.776	98,46%	37.478.700
2017	781.107	1,91%	40.118.470	98,09%	40.899.577
2018	677.168	1,36%	48.943.607	98,64%	49.620.775

Sumber: BPS Jawa Tengah Dalam 2019(diolah)

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik di Jawa Tengah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penyebab meningkatnya jumlah kunjungan nusantara dan mancanegara tersebut, dikarenakan dari tahun ke tahun Jawa Tengah memiliki daya tarik sendiri dibandingkan dengan daya tarik wisata yang ada di provinsi lain. Dalam kebijakan pengembangan Pariwisata Jawa Tengah yang tertuang didalam Rencana Industri Pariwisata (RIP) (dalam Haryanto, 2006: 3), wilayah Jawa Tengah dibagi dalam 4 wilayah pengembangan sub daerah tujuan wisata di antaranya:

1. Wilayah A, Kawasan Merapi-Merbabu meliputi: Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Purworejo, Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kendal, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang dan Kota Magelang.
2. Wilayah B, Kawasan Demak-Rembang meliputi: Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Grobogan.

3. Wilayah C, Kawasan Pekalongan-Tegal meliputi: Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan.
4. Wilayah D, Kawasan Cilacap-Banjarnegara meliputi: Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kebumen.

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah provinsi Jawa Tengah yang masuk ke dalam kawasan pengembangan pariwisata wilayah D pada kawasan Cilacap-Banjarnegara yang juga memiliki beragam potensi sumber daya baik sumber daya alam maupun buatan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan pariwisata. Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu daerah yang tengah menggenjot sektor pariwisata telah mengeluarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya di Kabupaten Purbalingga untuk menunjang berjalannya pengembangan pariwisata di Kabupaten Purbalingga, khususnya pengembangan desa wisata. Berdasarkan letak geografis Kabupaten Purbalingga yang menjadi keuntungan dimana letaknya berada dibawah kaki gunung slamet, sehingga memiliki potensi alam seperti air terjun, hulu sungai, tebing dan bukit-bukit yang kini mulai dikembangkan lagi potensinya agar memiliki daya tarik wisatawan lokal maupun asing dengan kebudayaan dan tradisi yang berbeda-beda tiap daerahnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui obyek yang ditawarkan. Sebagai sebuah Kabupaten, Purbalingga memiliki wewenang sendiri untuk mengelola sumber daya

yang terdapat di wilayahnya, termasuk potensi sumberdaya pariwisata. Untuk mengetahui jumlah kunjungan pariwisata di Purbalingga dan kondisi jumlah kunjungannya apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah akan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. 2 Jumlah Wisatawan Nusantara yang Berkunjung di Jawa Tengah Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Jumlah	Kabupaten/Kota	Jumlah
Banjarnegara	1,092,582	Kota Magelang	949,710
Banyumas	1,694,676	Kota Pekalongan	546,461
Batang	1,008,632	Kota Semarang	3,023,441
Blora	229,823	Kota Tegal	559,669
Boyolali	592,047	Kudus	850,414
Brebes	477,395	Pati	1,247,109
Cilacap	524,951	Pemalang	423,148
Demak	1,526,709	Purbalingga	1,377,126
Grobogan	448,079	Purworejo	958,031
Jepara	1,753,238	Rembang	1,222,448
Magelang	4,300,990	Salatiga	74,304
Pekalongan	371,478	Sragen	451,324
Semarang	2,228,500	Sukoharjo	53,067
Tegal	684,238	Kota Surakarta	2,489,421
Karanganyar	1,352,639	Temanggung	416,638
Kebumen	1,043,868	Wonogiri	420,084
Kendal	164,106	Wonosobo	1,027,789
Klaten	1,315,641	TOTAL	36,899,776

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2016 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas yang menyajikan jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke daya tarik wisata berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 menunjukkan jumlah kunjungan pariwisata pada 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 sebanyak 36,899,776, dengan kunjungan paling kecil sebanyak 53,067 wisatawan yaitu pada Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan, kunjungan terbesar ada di Kabupaten Magelang sebanyak

4,300,990 wisatawan. Kabupaten Purbalingga menempati posisi ke-8 terbanyak dengan jumlah pengunjung sebanyak 1,377,126.

Sektor pariwisata juga menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah, berikut akan disajikan pendapatan pada sektor pariwisata setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Tabel 1. 3 Jumlah Pendapatan pada Sektor Pariwisata Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Jumlah	Kabupaten/Kota	Jumlah
Banjarnegara	12,140,353,915	Kota Magelang	-
Banyumas	9,174,755,312	Kota Pekalongan	1,081,989,250
Batang	1,118,909,600	Kota Semarang	18,157,756,234
Blora	262,967,800	Kota Tegal	930,545,200
Boyolali	1,413,599,500	Kudus	1,516,302,000
Brebes	1,292,006,650	Pati	106,506,972
Cilacap	69,195,475	Pemalang	2,137,317,000
Demak	1,351,246,000	Purbalingga	22,166,648,264
Grobogan	1,796,787,217	Purworejo	2,109,250,712
Jepara	2,764,942,814	Rembang	1,407,594,550
Magelang	100,573,670,296	Salatiga	31,080,000
Pekalongan	2,634,092,000	Sragen	3,133,555,228
Kabupaten Semarang	16,764,640,560	Sukoharjo	101,372,000
Tegal	4,481,614,800	Kota Surakarta	10,175,550,000
Karanganyar	287,179,300	Temanggung	4,995,023,988
Kebumen	5,539,673,720	Wonogiri	3,269,118,800
Kendal	133,208,504	Wonosobo	4,522,368,000
Klaten	732,509,185	TOTAL	238,373,330,846

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan Bidang Teknis Dinbudpar Provinsi Jawa Tengah(diolah)

Berdasarkan tabel 1.3, kabupaten dengan pendapatan dari sektor pariwisata tertinggi adalah Kabupaten Magelang, yaitu sebesar Rp 100.573.670.296. sedangkan Kabupaten Purbalingga menempati posisi kedua kabupaten dengan pendapatan tertinggi dari sektor wisata sebesar Rp22.166.648.264. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga sudah baik dalam

pengelolaan potensi wisata, terbukti dengan pendapatan yang besar dari sektor pariwisata. Kabupaten Purbalingga mempunyai berbagai tempat wisata yang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Tempat Wisata Alam

Terdapat di Kecamatan Karangreja: Pendakian Gunung Slamet, Goa Lawa, Agrowisata Serang, Gunung Lompong, Curug Silintang, dan Bumi Perkemahan Serang, Kecamatan Bojongsari: Desa Wisata Karangbanjar dan Bumi Perkemahan Munjul Luhur.

b. Tempat Wisata Budaya dan Pengetahuan

Terdapat di Kecamatan Rembang: Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman, , Kecamatan Bobotsari: Situs Mujan, Kecamatan Purbalingga: Museum Profesor Purwakawaca, dan Masjid Agung Darussalam, Kecamatan Mrebet: Wisata Batu Putin, Situs Onje, dan Situs Batu Tulis Cipaku.

c. Tempat Wisata Buatan

Terdapat di Kecamatan Bojongsari: Owabong, Kecamatan Kutasari: Sanggaluri Park dan Kolam Renang Tirta Asri, Kecamatan Padamara: Purbasari Pancuran Mas.

Berbagai jenis objek wisata yang menjadi daya tarik wisatawan unuk berkunjung ke Kabupaten Purbalingga pada setiap tahunnya selalu ditingkatkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata yang adadi Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 1. 4 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Pengunjung	Persentase
2015	1.579.098	
2016	1.585.334	0,4%
2017	1.905,608	20,2%
2018	3.793.184	99%
2019	1.346.171 (september)	64,5% (-)

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purbalingga, 2019

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Purbalingga selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan kunjungan tertinggi pada tahun 2018 sebanyak 3.793.184 wisatawan dengan persentase hampir 200% dari tahun sebelumnya. Kunjungan wisatawan masih didominasi oleh PD Owabong dengan total kunjungan sebanyak 1,15 juta wisatawan dan meraup pendapatan sebanyak Rp 27 miliar, sedangkan kunjungan ke desa wisata juga ternyata cukup tinggi. Sepanjang tahun 2018 tercatat 884.871 pengunjung melancong ke 17 desa wisata maupun rintisan desa wisata.

Di tahun 2019 tingkat kunjungan ke sejumlah objek wisata di Purbalingga menurun drastis. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang menyentuh angka 3.7 juta wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Data dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Purbalingga per September jumlah kunjungan telah mencapai 1.346.171 orang untuk kategori objek wisata. Jumlah tersebut belum mencapai setengah dari jumlah kunjungan tahun lalu. Menurunnya kunjungan tersebut salah satu penyebabnya diakibatkan oleh rendahnya inovasi dari pengelola wisata. Dikutip dari *SatelitPos.com* (26 November 2019), Kabid Pariwisata Dinporapar Purbalingga, Kustinah, menjelaskan bahwa sejumlah faktor berpengaruh pada menurunnya angka kunjungan wisata di wilayah Purbalingga

disebabkan oleh bermunculannya objek wisata baru, sedangkan inovasi masih kurang. “Budaya masyarakat kita suka mencari hal yang baru oleh karena itu objek wisata yang sudah ada dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif untuk menarik kunjungan wisata”. Terkait keberadaan desa wisata, Kustinah mengingatkan agar desa-desa dimulai jeli untuk mengembangkan potensi lokal yang ada di wilayahnya menjadi destinasi wisata. “Dengan mengembangkan potensi lokal maka objek wisata akan lebih beragam dan tidak terjadi duplikasi”.

Kabupaten Purbalingga beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam bidang pariwisata. Kemajuan di sektor pariwisata antara lain dibangunnya taman wisata air Owabong dan Purbasari, taman reptil (*reptile park*), museum uang, dll. Pendapatan dari sektor pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar bagi APBD Kabupaten Purbalingga. Data sumbangan PAD Objek wisata di Kabupaten Purbalingga akan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. 5 Data PAD Obyek Wisata Dinbudparpora Kabupaten Purbalingga Tahun 2016

NO	NAMA OBYEK	JUMLAH PAD
1	Owabong	21.433.525.249
2	Purbasari Pancuran Mas	1.926.915.088
3	Kolam Renang Tirta Asri Walik	1.315.045.000
4	Sanggaluri Park	4.553.473.520
5	Goa Lawa	598.823.323
6	Petilasan Ardilawet	39.450.000
7	Taman Usaman Janatin	682.592.300
8	MTL. Jendral Soedirman	35.286.000
9	Buper Munjuluhur Karangbanjar	115.063.600
10	Pendakian Gunung Slamet	75.000.000
	Jumlah	30.775.174.080

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga (2016)

Berdasarkan tabel 1.4, menurut data yang bersumber dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purbalingga, seluruh kunjungan wisatawan pada tahun 2016 mampu memberikan pemasukan ke kas pemerintah daerah sebesar Rp30.775.174.080. Namun, jumlah kunjungan tersebut masih didominasi oleh obyek-obyek wisata seperti Owabong, Purbasari Pancuran Mas, Taman Reptil, Kolam Renang Tirta Asri Walik, Goa Lawa, dan Buper Munjulluhur.

Obyek wisata yang menjadi tujuan wisata merupakan segala sesuatu baik berupa bentukan dan/atau aktivitas dan fasilitas yang saling berhubungan dan memiliki daya tarik tersendiri sehingga dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk mengunjungi suatu daerah/tempat tertentu. Sebagai produk suatu obyek tujuan wisata agar dapat dijual di masyarakat dan pasar wisata, maka obyek tujuan wisata tersebut harus memiliki 3 (tiga) tiga komponen utama yaitu atraksi atau keunikan dari tempat tujuan atau destinasi, fasilitas di lokasi tujuan wisata dan aksesibilitas dari lokasi tujuan wisata atau destinasi (Hadinoto, 1996).

Dewasa ini para wisatawan mulai menggemari tempat wisata yang tidak hanya menyajikan potensi keindahan alam saja, namun lebih mengarah kepada wisata yang menyediakan adanya interaksi dengan masyarakat lokal. Adanya pergeseran kunjungan wisatawan ke desa ini maka mulai dikembangkan wisata khusus yang disebut dengan desa wisata yang kental dengan daya tarik budaya dan hidup bersama dengan penduduk lokal. Dengan dikembangkannya desa wisata maka akan dapat menambah daya tarik wisata yang lebih beragam dan

mampu menarik minat wisatawan untuk berwisata di desa, yang kemudian akan dapat meningkatkan aktivitas perekonomian di desa setempat sehingga dapat tercipta pemerataan pembangunan dan desa wisata tersebut mampu bersaing dengan objek wisata lainnya. Di Kabupaten Purbalingga sendiri sejak tahun sudah 2013 mulai dikembangkan potensi wisata alam pedesaan dan mulai mengenalkan desa wisata kepada para wisatawan.

Desa wisata di Purbalingga perlu dikembangkan karena merupakan salah satu misi dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purbalingga, yakni mengembangkan dan meningkatkan kepariwisataan yang berbasis masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan. Pemerintah Kabupaten telah mengeluarkan regulasi terkait pengembangan desa wisata yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya Di Kabupaten Purbalingga. Pengembangan pariwisata, khususnya desa wisata, dapat menambah daya tarik wisata yang berbeda dari objek wisata yang telah ada sebelumnya di Purbalingga yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

Banyak desa yang memiliki ciri khas dan daya tarik masing-masing yang mendukung Purbalingga sebagai daerah destinasi wisata. Desa-desanya tersebut kemudian dikembangkan menjadi desa wisata yang menawarkan berbagai macam potensi yang dimiliki. Menurut data statistik, hingga saat ini tercatat terdapat 17 desa wisata dengan jumlah kunjungan wisatawan di seluruh desa wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 mencapai 884.871 wisatawan. Tujuh

belas desa wisata tersebut adalah Desa Wisata Panusupan, Limbasari, Karangbanjar, Purbayasa, Gunungwuled, Desa Wisata Siwarak, Bojongsari, Serang, Karangcegak, Tanalum, Sangkanayu, Bumisari, Bantarbarang, Kutasari, Bokol, Karangmalang, dan Desa Wisata Kaliori. Desa Wisata yang terdapat di Kabupaten Purbalingga menawarkan berbagai macam potensi yang dimiliki antara lain perbukitan, bentang sawah yang masih asri, air terjun, sejumlah seni tradisi, peninggalan budaya dan keunikan lokal lainnya. Pengembangan desa wisata di Kabupaten Purbalingga terus menjadi prioritas, di tahun 2019 Pemkab Purbalingga merintis 10 desa wisata baru yang nantinya digadang-gadang dapat menjadi destinasi wisata baru yang tak kalah bagus dari desa wisata yang sudah ada.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 556/297 Tahun 2013 tentang Penetapan Desa Limbasari Kecamatan Bobosari Kabupaten Purbalingga sebagai Desa Wisata menerangkan bahwa Desa Limbasari merupakan sebuah Desa Wisata yang pengembangannya perlu ditindaklanjuti secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Desa Wisata Limbasari adalah salah satu desa wisata di Kabupaten Purbalingga yang terdapat di Desa Limbasari, Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga yang berjarak kurang lebih 16 kilometer ke arah Utara dari pusat kota Purbalingga. Desa Limbasari memiliki organisasi yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Limbasari yaitu Pokdarwis Patrawisa (Kelompok Sadar Wisata). Ketua Pokdarwis Patrawisa mengatakan bahwa pada tahun 2013, Desa Wisata Limbasari ini menjadi desa wisata terbaik se-Purbalingga.

Pokdarwis Desa Limbasari “Patrawisa” resmi dibentuk pada tanggal 20 Mei 2012 yang beranggotakan masyarakat desa sekitar dan sekretariat berada di

dusun II yaitu Arjosari. Desa Limbasari ini memiliki 4 dusun, yaitu dusun Limbasari, dusun Arjosari, dusun Karangjoho, dan dusun Sitrondol Desa Limbasari ini merupakan salah satu desa wisata yang diarahkan oleh pemerintah Purbalingga untuk menjadi desa wisata unggulan karena Desa Limbasari memiliki potensi alam, budaya, religi, dan pendidikan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 6 Potensi Wisata Desa Limbasari

No.	Jenis Wisata	Potensi
1	Wisata Alam	Tubing Sungai Tuntung gunung, Bendung Patrawisa, Bukit Patrawisa, Air terjun Uncang uncang, Air terjun Pangamun-amun, Gunung Plana, Gunung Tukung
2	Wisata Budaya	Batik Limbasari, Situs-situs peninggalan jaman neolitikum
3	Wisata Religi	Legenda Putri Ayu Limbasari, Pertapaan Tunggul Wulung
4	Wisata Pendidikan	Gendhis Jawi, Kebun Belajar, Kampung Inggris.

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purbalingga, 2016

Berdasarkan tabel di atas, terlihat berbagai macam potensi dan jenis wisata yang ada di Desa Wisata Limbasari dan layak untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata yang menarik dan potensial, namun kenyataannya pada saat ini potensi yang dimiliki belum dikembangkan secara maksimal, hanya potensi sungai yang dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Menurut wawancara dengan Ketua Pokdarwis di Desa Wisata Limbasari, perkembangan Desa Wisata Limbasari dapat dikatakan yang paling lambat dibandingkan dengan desa wisata lain. Hal tersebut diperkuat dengan menurunnya jumlah pengunjung dari tahun ke tahun yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. 7. Jumlah Pengunjung Desa Wisata Limbasari Tahun 2016-2019

Tahun	Jumlah Pengunjung (Orang)	Keterangan
2016	2.500	Didominasi wisatawan dalam negeri, dan beberapa wisatawan yang berasal dari mancanegara (Ukraina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Australia)
2017	750	Didominasi wisatawan dalam negeri
2018	800	Didominasi wisatawan dalam negeri
2019	500	Didominasi wisatawan dalam negeri

Sumber : Hasil Wawancara Ketua Pokdarwis Desa Limbasari, 2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat menurunnya jumlah pengunjung di Desa Wisata Limbasari selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan wawancara pra survey yang dilakukan dengan seorang narasumber yang merupakan salah satu anggota Pokdarwis Patrawisa Desa Limbasari mengatakan :

“Untuk program pembangunan ya biasanya dari pemerintah, diambil dari dana desa, tapi sepenuhnya yang menginisiasi dari pemerintah Kabupaten, biasanya dari dinas pariwisata datang lalu menyampaikan bulan ini akan dibangun aula di dekat curug. Dari Pokdarwis sendiri hanya melaksanakan program saja”.

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pengembangan desa wisata bukan tanpa hambatan, peran aktor dalam pengembangan pariwisata dirasa masih kurang maksimal. Kebanyakan program pengembangan desa wisata yang berjalan ialah berawal dari inisiasi pemerintah kabupaten, kesadaran dan inovasi dari masyarakat maupun Pokdarwis masih sangat kurang, hal tersebut berakibat pada bertumpunya dan dominannya peran pemerintah kabupaten dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari.

Dikutip dari *Purbalinggakab.go.id*, secara umum kendala pengembangan desa wisata di Kabupaten Purbalingga relatif sama. Diantaranya yaitu terkendala

oleh infrastruktur yang masih kurang dan kurang sinerginya para aktor dalam pengembangan desa wisata.

“Kades Tanalum Kecamatan Rembang mengungkapkan, prasarana jalan menuju sejumlah curug yang menjadi pendukung desa wisata, kondisinya masih sempit. Misalnya, jalan menuju Curug Karang, meski sudah beraspal, namun tidak bisa untuk simpangan kendaraan roda empat. Begitu juga, prasarana jalan dari Dukuh Pucung Rumbak menuju curug Nagasari. Kondisi jalannya hanya selebar dua meter. Selain persoalan fasilitas jalan, Kepala Desa Tanalum juga mengungkapkan persoalan kesadaran pedagang dan pengunjung yang masih membuang sampah sembarangan. Kondisi ini terjadi hampir di setiap tempat wisata di Purbalingga.”

Pengembangan Infrastruktur khususnya prasarana jalan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih menjadi tantangan pengembangan sejumlah desa wisata di Purbalingga, termasuk di Desa Wisata Limbasari. Prasarana jalan menuju beberapa objek wisata hanya bisa diakses dengan kendaraan kecil, tidak mampu dengan bus besar. Sementara, masyarakat belum sepenuhnya sadar tentang pentingnya menjaga desa wisata, diantaranya para pengunjung dan pedagang yang masih sering membuang sampah sembarangan. Sehingga lagi-lagi pemerintah kabupaten yang harus melakukan *maintanance* dan *controlling* secara rutin demi keberhasilan pengembangan desa wisata.

Peran dari media masa masih kurang dalam mempromosikan berbagai destinasi wisata yang ada. Imam Tahyudin, Dhanar Intan Surya Saputra, 2015, dalam penelitiannya yang berjudul “Aplikasi *Augmented Reality* (AR) sebagai Inovasi Promosi Objek Wisata di Kabupaten Purbalingga”, menemukan sebuah masalah yaitu masih kurangnya peranan media masa dalam mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dalam pengembangan pariwisata terjadi masalah yaitu kurangnya pemerataan pengenalan objek wisata,

hanya beberapa saja yang terkenal yaitu Owabong, Purbasari Pancuran Mas, Sanggaluri Park, dan Buper Munjulluhur.

Peran masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari masih kurang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Elfianita, Elina, 2016, Pengembangan Pariwisata Berbasis *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Wisata Limbasari Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Dalam penelitian tersebut menekankan pada keterlibatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata (*Community Based Tourism*) menjadi satu faktor penting, karena masyarakatlah yang memahami dan menguasai wilayahnya. Namun, pada kenyataannya pengembangan pariwisata berbasis *Community Based Tourism* ini belum optimal dilakukan, karena masih menggunakan pendekatan pembangunan *Top-down approach*, dimana pendekatan yang lebih menitikberatkan pada keseragaman biasanya diwujudkan dalam bentuk program-program pembangunan masyarakat yang dirancang pada tingkat pusat, kemudian diterapkan di seluruh masyarakat desa yang ada tanpa memerhatikan perbedaan karakteristik masing-masing desa. Pendekatan ini dirasa kurang memberdayakan masyarakat atau komunitas yang ada di desa karena tidak melibatkan masyarakat setempat dalam melakukan managerial wisata, masyarakatlah yang lebih mengerti akan potensi dan sumber daya alam wilayahnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah **“MENGAPA PERAN AKTOR DALAM IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN DESA WISATA LIMBASARI BELUM OPTIMAL?”**.

1. 2. Identifikasi Masalah

1. Dominannya peran pemerintah dalam pengembangan desa wisata di Purbalingga.
2. Belum optimalnya peran Pokdarwis sebagai penginisiasi program, sehingga inovasi dalam pembangunan masih kurang.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat pelaku kegiatan pariwisata, seperti pengunjung dan pedagang untuk menjaga lingkungan.
4. Media promosi wisata yang masih belum optimal, sehingga desa wisata yang terekspose masyarakat hanya desa wisata yang memang sudah mumpuni.
5. Infrastruktur dan akses jalan masih belum memadai.
6. Belum sinerginya aktor dalam pengembangan desa wisata

1. 3. Perumusan Masalah

Masalah merupakan suatu kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sudah terjadi tentang suatu perihal, atau kesenjangan antara kenyataan yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi serta harapan dan kenyataannya (Notoadmojo, 2007). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Siapa saja aktor yang terlibat dalam implementasi pengembangan Desa Wisata Limbasari?
2. Bagaimana peran aktor dalam implementasi pengembangan Desa Wisata Limbasari?

3. Apa yang menyebabkan peran aktor dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari belum berjalan secara optimal?

1. 4. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam implementasi pengembangan Desa Wisata Limbasari.
2. Menganalisis peran aktor dalam implementasi pengembangan Desa Wisata Limbasari.
3. Mengidentifikasi faktor yang menyebabkan peran aktor dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari belum berjalan secara optimal.

1. 5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan Ilmu Kebijakan Publik khususnya tentang jaringan aktor.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana dan pengetahuan tentang jaringan aktor dalam implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Limbasari.

2. Manfaat Praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Purbalingga dalam membuat kebijakan pengembangan Desa Wisata Limbasari.

- 2) Bagi peneliti, penelitian ini dapat bermanfaat dalam rangka untuk lebih memahami dan mendalami teori jaringan aktor dan peranan aktor dalam implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Limbasari.
- 3) Memberikan masukan kepada peneliti berikutnya yang membahas peran aktor dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari.

1. 6. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 8 Penelitian Terdahulu

NO.	PENELITI, TAHUN, JUDUL, NAMA JURNAL	METODE PENELITIAN, TEORI	HASIL PENELITIAN
1	Elina Elfianita, 2017, Pengembangan Pariwisata Berbasis <i>Community Based Tourism</i> (CBT) di Desa Wisata Limbasari Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. (Pengembangan Pariwisata Berbasis CBT (Elina Elfianita), Jurnal Pendidikan Luar Sekolah)	Deskriptif Kualitatif. Teori Pengembangan Pariwisata berbasis <i>Community Based Tourism</i> (Rara Sugiarti, 2009 :20). <i>Community based tourism</i> adalah pariwisata yang berbasis komunitas, dimana masyarakat yang memiliki wewenang dan penentu dalam berbagai aspek pembangunan pariwisata itu sendiri. (Rara Sugiarti, 2009 : 20) Masyarakat diposisikan sebagai penentu, serta keterlibatan masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai kepada pelaksanaannya.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Strategi pengembangan pariwisata berbasis CBT di Desa Limbasari yaitu dengan promosi, pembangunan fisik, penerapan sapta pesona wisata, penambahan sarana dan prasarana serta kegiatan – kegiatan kepariwisataan. (2) Usaha – usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata dalam Pengembangan Desa Wisata adalah dengan menjadikan Desa Limbasari sebagai Desa Wisata Terpadu, memberikan bentuk – bentuk pelatihan untuk masyarakat dan menerapkan sapta pesona wisata di Desa wisata Limbasari. (3) Faktor penghambat dalam pengembangan desa wisata di Limbasari adalah masyarakat, izin dari perhutani serta persaingan obyek, daya tarik wisata antar wilayah di Limbasari Kabupaten Purbalingga, dan masih kurangnya peran masyarakat dan pokdarwis dalam pengembangan Desa Wisata. (4) Faktor pendukung dalam pengembangan desa wisata adalah SDM, alam, sejarah dan budaya,

			keuangan, kemitraan, sarana dan prasarana serta transportasi.
2	Imam Tahyudin dan Dhanar Intan Surya Saputra, 2015, Aplikasi <i>Augmented Reality</i> (AR) sebagai Inovasi Promosi Objek Wisata di Kabupaten Purbalingga. (Seminar Nasional Informatika 2015)	Deskriptif Kualitatif. Teori pengembangan aplikasi <i>Augmented Reality</i> dalam penelitian Huang, Mukhlis, dan Hardiyansah. Aplikasi <i>augmented reality</i> (AR) sebagai inovasi promosi objek wisata di Kabupaten Purbalingga, pada sisi pembaca bersifat <i>single user</i> . Dimana masing-masing pembaca akan menjalankan aplikasi mereka tersendiri menggunakan <i>smartphone</i> yang mereka miliki. <i>User</i> tersebut dapat menjalankan aplikasi ini dengan mengarahkan kamera pada <i>smartphone</i> ke media penanda yang telah ditentukan oleh pihak redaksi. Secara umum alur sistem aplikasi <i>mobile augmented reality</i> yang dibuat adalah sebagai berikut : a. Pembaca brosur mendapatkan gambar sebagai penanda bahwa gambar tersebut merupakan informasi yang dapat diakses melalui <i>augmented reality</i> . b. Pembaca (<i>user</i>) membuka aplikasi melalui <i>Smartphone Android</i> yang sudah terinstall Layar App. c. <i>User</i> mengarahkan kamera ponsel	Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Masih rendahnya promosi objek wisata, khususnya dalam promosi di Desa Wisata. (2) Penerapan <i>augmented reality</i> (AR) sebagai inovasi promosi objek wisata di Kabupaten Purbalingga terdapat setidaknya dua user yang saling berhubungan yaitu sis Redaksi dan Pembaca. (3) Bagi redaksi diharapkan mengunggah gambar sebagai <i>markers complex</i> sesuai dengan ketentuan seperti gambar jelas, tidak kabur (<i>blur</i>) dan diharapkan proses cetak pada edisi terbit juga tidak terdapat kerusakan gambar atau terjadinya lipatan kertas.

		<p>android kearah gambar yang ingin ditampilkan informasinya.</p> <p>d. Ketika <i>user</i> mengarahkan kamera ke gambar yang akan ditampilkan informasinya, secara otomatis kamera <i>Smartphone Android</i> akan melacak gambar yang sudah diregistrasi tersebut ke Cloud Layar dan kemudian akan memunculkan informasi (video, gambar atau <i>virtual</i> tombol).</p>	
3	<p>Tri Yuniningsih, Titi Darmi, dan Susi Sulandari, 2019, Model <i>Pentahelik</i> dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Semarang. (Journal of Public Sector Innovation, Vol. 3, No. 2, Mei Tahun 2019, (84 – 93)</p>	<p>Deskriptif Kualitatif.</p> <p>Teori aktor kebijakan {Howlett dan Rames (1995), dalam Suwitri (2011)} dan Model <i>Pentahelix</i> (Arif Yahya, 2016). Yang dimaksud Pentahelix menurut Arif Yahya adalah kolaborasi 5 (Lima Unsur) unsur subjek atau stakeholder pariwisata, yaitu: <i>Academician, Business, Community, Government</i> dan Media. Biasa disingkat ABCGM. Menurut Howlett dan M. Ramesh {Howlett dan Rames (1995), dalam Suwitri(2011)} mengemukakan bahwa aktor kebijakan (<i>policy aktor</i>) merupakan <i>policy subsystem</i> yang berada dalam jejaring kebijakan antara <i>organization of the international system, organization of the society</i> dan</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengembangan pariwisata kota Semarang menggunakan model <i>pentahelix</i>, sudah melibatkan akademisi, pemerintah, komunitas, bisnis, dan media massa. (2) Temuan lapangan adalah Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang (BP2KS) belum optimal, dan (3) Kerjasama antar aktor model <i>pentahelix</i> yang ada di kota Semarang dari hasil penelitian belum optimal.

		<p><i>organization of the state</i>. Aktor kebijakan terdiri atas : 1) <i>elected officials</i> yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, 2) <i>appointed officials</i> atau pejabat politik yang ditunjuk oleh pejabat politik terpilih untuk duduk dalam birokrasi, 3) <i>interest group</i>, 4) <i>research organization</i>, 5) media massa.</p>	
4	<p>Tsuraya Annisa Salsabila dan R. Slamet Santoso, 2018, Analisis <i>Stakeholders</i> (Aktor Kebijakan) dalam Pengembangan Obyek Wisata Candi Gedongsongo di Kabupaten Semarang. (Jurnal Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro)</p>	<p>Deskriptif Kualitatif. Teori Analisis <i>Stakeholders</i> menurut Blackman (2003:23), Analisis <i>Stakeholders</i> menurut Blackman (2003:23) terdapat beberapa tahapan yaitu : 1) Tingkat Ketertarikan <i>Stakeholders</i>; 2) Pengaruh dan Kepentingan <i>Stakeholders</i>; 3) Identifikasi Peran <i>Stakeholders</i>. Teori Aspek Pengembangan Pariwisata menurut Swarbroo (1996:99), dalam pengembangan pariwisata diperlukan beberapa aspek yang mendukung antara lain : 1) Aspek Fisik; 2) Aspek Daya Tarik Pariwisata; 3) Aspek Aksesibilitas; 4) Aspek Aktivitas dan Fasilitas; 5) Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Efektifitas peran <i>stakeholders</i> dalam Pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo yang dilakukan oleh tujuh <i>stakeholders</i> yaitu Dinas Pariwisata Kab. Semarang, BPCB Jawa Tengah, Perum Perhutani, Perwakilan Paguuban Juru Parkir, Pedagang, dan Penyewaan Kuda (Warga Sekitar), Pengelola Tiket Candi Gedongsongo, BARENLITBANGDA Kab. Semarang, DPU Kab. Semarang belum dapat dikatakan efektif. Hal ini disebabkan karena kepentingan dan pengaruh <i>stakeholders</i> masih ada yang belum sesuai. Sehingga Efektifitas peran <i>stakeholders</i> dalam pengembangan Candi Gedongsongo dirasa belum efektif karena terdapat <i>stakeholders</i> yang masih belum melaksanakan tugasnya dengan baik, peran yang dilakukan</p>

			<p>dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo belum maksimal sehingga pengembangannya cenderung tidak cepat.</p> <p>(2) Hubungan antar <i>stakeholders</i> dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo secara hubungan memang sudah baik tetapi dalam koordinasi <i>stakeholders</i> belum dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya forum khusus terjadwal antara <i>stakeholders</i> baik yang terikat perjanjian maupun yang tidak terikat dengan perjanjian. Sedangkan jejaring kebijakan yang dilihat dari efektivitas peran <i>stakeholders</i> juga masih belum baik karena berdasarkan hasil penelitian peneliti, efektivitas peran <i>stakeholders</i> dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo masih belum tercapai. Melihat adanya jarak kepentingan dan pengaruh pada <i>stakeholders</i> primer dan sekunder pasti menyebabkan adanya ketidaktepatan hubungan <i>stakeholders</i> dalam pengembangan Candi Gedongsongo. Dinas Pariwisata sebagai <i>stakeholders</i> primer yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang paling tinggi diantara <i>stakeholders</i> primer lain menjadikan dinas ini sebagai titik pusat</p>
--	--	--	---

			dalam pengembangan padahal seharusnya hubungan antar <i>stakeholders</i> terlebih <i>stakeholders</i> primer harus seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa jejaring kebijakan antar <i>stakeholders</i> masih belum baik karena <i>stakeholders</i> sekunder dirasa lebih bisa atau ada kemungkinan lebih memiliki pengaruh dibandingkan dengan <i>stakeholders</i> primer.
5	Fitri Handayani, Hardi Warsono, 2017, Analisis Peran <i>Stakeholders</i> dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang. (Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro)	Deskriptif Kualitatif. Teori analisis <i>stakeholders</i> (Maryono et al.2005), <i>Stakeholders</i> dibagi menjadi 3 kelompok, antara lain: a. <i>Stakeholders</i> primer b. <i>Stakeholders</i> kunci c. <i>Stakeholders</i> sekunder atau pendukung Teori Peran <i>Stakeholders</i> (Nugroho, 2014. 16-17). Menurut Nugroho (2014, h.16-17) dalam penelitian Ali dkk, stakeholder dalam program pembangunan diklasifikasikan berdasarkan peranannya, antara lain: a. <i>Policy creator</i> yaitu stakeholder yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan. b. Koordinator yaitu stakeholder yang berperan mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat.	Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Pengembangan Pantai Karang Jahe melibatkan peran Dinbudparpora, masyarakat setempat, dan pengusaha Peran yang dijalankan oleh masing-masing pemangku kepentingan termasuk pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, pelaksana dan akselerator. Peran pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata lebih banyak penekanan pada peran fasilitator dalam bentuk fisik. (2) Faktor-faktor yang menghambat peran pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata Pantai Karang Jahe adalah lahan terbatas, anggaran terbatas, manusia terbatas sumber daya, pola pikir, peraturan, kegiatan promosi, dan kerja sama di antara para pemangku kepentingan. (3) Upaya sedang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat, yaitu melakukan kerja sama antara

		<p>c. Fasilitator yaitu stakeholder sebagai fasilitator yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.</p> <p>d. Implementer yaitu stakeholder pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.</p> <p>e. Akselerator yaitu stakeholder yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.</p>	<p>pengelola Pantai Karang Jahe dengan pemilik tanah, membangun kesadaran pariwisata melalui kelompok kesadaran pariwisata, dan memberdayakan penduduk desa untuk memanfaatkan limbah menjadi produk komersial, sanksi diatur di desa dalam hal pengembangan bisnis pariwisata, peningkatan Situs web Dinbudparpora terkait dengan kegiatan promosi objek wisata Pantai Karang Jahe, juga sebagai kebutuhan untuk melakukan kerjasama yang mengikat antara dukungan pemangku kepentingan melalui nota kesepakatan kerja sama.</p>
6	<p>Wirajati, Sudjarwanto dan Sukiman, 2016, Strategi Pengembangan Desa Wisata Limbasari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman ,EKO-REGIONAL, Vol.11, No.1</p>	<p>Deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.</p> <p>Teori Analisis SWOT dengan menggunakan analisis kuantitatif melalui Matriks Evaluasi Faktor Internal (<i>Internal Factor Evaluation – IFE Matrix</i>), (David, 2006:206-207). Menurut David (2006) bahwa matriks IE didasari pada dua dimensi kunci total rata-rata tertimbang IFE pada sumbu x dan total rata-rata tertimbang EFE pada sumbu y. Pada sumbu x dari Matriks IE, total rata-rata tertimbang dari 1,0 hingga 1,99 dianggap rendah; nilai dari 2,0 hingga 2,99 adalah</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya potensi dan kekuatan obyek wisata yang ada di Desa Wisata Limbasari belum mampu menarik banyak jumlah wisatawan yang berkunjung Desa Wisata Limbasari. 2. Dari hasil analisis mengenai kondisi internal Desa Wisata Limbasari diperoleh enam faktor kekuatan dan tujuh faktor kelemahan Desa Wisata Limbasari. Faktor-faktor tersebut berasal dari kondisi internal Desa Wisata Limbasari dan Kelompok Sadar Wisata sebagai pihak pengelola dan para wisatawan yang berkunjung, kondisi internal fasilitas, sarana

		<p>menengah; dan nilai dari 3,0 hingga 4,0 adalah tinggi. Matriks IE menurut David (2006) dibagi menjadi tiga daerah utama yang memiliki implikasi strategi berbeda yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Divisi yang masuk kedalam sel I, II, III, dan IV dapat digambarkan sebagai tumbuh dan kembangkan. Strategi intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk) atau integrative (integrase ke belakang, integrase ke depan, dan integrase horizontal) dapat menjadi paling sesuai untuk divisi-divisi ini. 2) Divisi yang masuk dalam sel III, V, dan VII dapat dikelola dengan cara terbaik dengan strategi jaga dan pertahankan; penetrasi pasar dan pengembangan produk adalah dua strategi yang umum digunakan untuk divisi tipe ini. 3) Rekomendasi yang umum diberikan untuk divisi yang masuk dalam sel VI, VIII, dan IX adalah tuai atau divestasi. 	<p>dan prasarana pendukung Desa Wisata Limbasari.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kondisi eksternal Desa Wisata Limbasari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga didapat enam faktor yang menjadi peluang dan tiga faktor yang menjadi ancaman Desa Wisata Limbasari. Faktor-faktor tersebut berasal dari kondisi eksternal Desa Wisata Limbasari dan Kelompok Sadar Wisata sebagai pihak pengelola dan para wisatawan yang berkunjung, kondisi eksternal fasilitas, sarana dan prasarana pendukung Desa Wisata Limbasari. 4. Dari hasil perhitungan menggunakan Matriks IFE, Matriks EFE, Matriks IE, dan Matriks SWOT diketahui bahwa Desa Wisata Limbasari terletak pada sel ke-I Matriks IE. Pada sel tersebut mendukung pertumbuhan dan pembangunan (<i>grow and build</i>) berupa strategi intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk) atau strategi <i>integrative</i> (integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal). Kemudian dari hasil analisis matriks SWOT diperoleh lima strategi SO, delapan strategi WO, empat strategi ST, empat strategi WT.
7	Kanita Khoirun Nisa, 2019, Pengembangan Pariwisata Berbasis	<p>Deskriptif Kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori pengembangan pariwisata berbasis</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perubahan antara sebelum adanya CBT dan setelah adanya CBT di Desa Wisata

	<p>Masyarakat di Desa Wisata Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, Jurnal Hermeneutika Volume 5, Nomor 1</p>	<p>masyarakat untuk pertama kalinya dipopulerkan oleh Murphy (Mualissin, 2007). Menurut Murphy (1985) dalam Mualissin (2007), produk pariwisata secara lokal harus melibatkan masyarakat lokal, sebagai bagian dari produk <i>tourisme</i>. Selain itu, dari pihak industri juga harus melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Sebab, masyarakat lokal yang harus menanggung dampak kumulatif dari perkembangan wisata dan mereka membutuhkan untuk mempunyai input yang lebih besar, yaitu bagaimana masyarakat dikemas dan dijual sebagai produk pariwisata (Murphy, 1985: 16) dalam Mualissin (2007). Menurut Hadiwijoyo (2012), keberhasilan dalam CBT harus memenuhi elemen-elemen yang diperhatikan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) sumber daya alam budaya, (2) organisasi-organisasi masyarakat, (3) manajemen, dan (4) pembelajaran (2012: 74) 	<p>Panusupan, baik dari segi jumlah destinasi wisata, jumlah pengunjung, aktor yang terlibat, dan partisipasi masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perkembangan wisata di Desa Panusupan dilihat dari jumlah destinasi wisata meningkat dilihat dari beragam destinasi yang ada. Destinasi tersebut selanjutnya masuk ke dalam kategori wisata petualang (<i>tracking</i>) yang ada di Desa Panusupan. 3. Pada saat CBT sudah diterapkan, masyarakat semakin aktif terlibat dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di Desa Panusupan. Beberapa lembaga kemasyarakatan juga lebih aktif berpartisipasi dalam pengembangan wisata, sehingga banyak wisatawan yang tertarik untuk mengexplore desa wisata tersebut.
8	<p>Serly Wulandari dan Sari Indah Murwani, 2018, Pola Kemitraan dalam Pengembangan Pariwisata</p>	<p>Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori kemitraan dari Wibisono, dimana terdapat 3 (tiga) dimensi yang menjadi</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Purbalingga, dalam kenyataannya belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari

	<p>di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Manajemen Pembangunan Vol. 5, No. 2.</p>	<p>prinsip penting dalam pola kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat sebagai pelaku pariwisata.</p>	<p>kurangnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pola kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Purbalingga sudah berjalan cukup baik namun belum optimal. 3. Model kerjasama yang dibangun pihak swasta dan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam model <i>Pseudo partnership</i> atau kemitraan semu jika ditinjau dari fenomena biologis kehidupan organisme. Sedangkan jika ditinjau dari azas kehidupan organisasi pada umumnya, termasuk dalam model <i>Subordinate union of partnership</i> yaitu kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif. 4. Faktor-faktor yang memengaruhi pola kemitraan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak, adanya harapan keuntungan, pertemuan jangka waktu, pelaksanaan tugas, dan kualitas layanan.
9	<p>Gunnar Thor Johannesson, 2015, <i>Tourism Translations : Actor-</i></p>	<p>Deskriptif Kualitatif. <i>Actor Network Theory (ANT)</i> menurut Bruno Latour. Teori Jaringan-Aktor</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Utilitas umum ANT untuk studi wisata terletak pada penekanannya pada materialitas relasional</p>

	<p><i>Network Theory and Tourism Research.</i> (Tourist studies London, Thousand Oaks and New Delhi vol 5(2) 133–150)</p>	<p>atau <i>Actor-Network-Theory</i> atau sering disingkat ANT berpendapat bahwa sebuah penemuan ilmiah tidak berasal dari satu orang tertutup saja. Namun demikian sebuah teori ilmiah berasal dari jaringan-jaringan baik suatu subjek (manusia) maupun objek mati (non-manusia).</p>	<p>dan simetri umum yang bersama-sama mengubah pandangan bahwa anggapan serius aktor non-manusia dalam analisis ANT menciptakan ruang untuk menghargai peran yang dimainkan oleh sifat, bahan, dan teknologi pariwisata terjadi dan dalam mengembangkan tempat-tempat wisata.</p> <p>(2) Dalam kasus Pingeyri perubahan atau gerakan ini ada hubungannya dengan pariwisata dan hal tersebut dicapai melalui partisipasi dalam ruang jaringan Destination Viking – Sagalands, yaitu proyek Sagas dan Storytelling. Jaringan yang terbentuk bersifat konsisten selama hubungan kerja antara semua bagiannya konstan. Peneliti mungkin tidak melihat secara jelas bahwa proyek DVS didasarkan pada pemesanan seperti jaringan. Tanpa ragu ada gangguan dengan jenis pemesanan lain tetapi hal tersebut masuk akal untuk menggambarkan proyek DVS yang didasarkan pada pemesanan jaringan. Hal ini berdasarkan logika timbal balik antara mitra individu dan antara proyek-proyek manajemen dan dewan NPP. Dengan demikian proyek DVS tidak dapat diubah dengan mudah. Ia bergerak di antara tempat-tempat di ruang Euclidian tetapi menahannya dalam bentuk jaringan ruang. Pada saat yang sama itu juga menambah</p>
--	---	--	--

			pergerakan tempat-tempat di ruang lain dari Euclidian.
10	Trisna Putra, 2019, <i>A Review on Penta Helix Actors In Village Tourism Development and Management</i> . (JBHOST, Vol 05 Issue 01, 2019: 63-75, ISSN 2527-9092)	Deskriptif Kualitatif. Model <i>Pentahelix</i> (Arif Yahya, 2016). Yang dimaksud Pentahelix menurut Arif Yahya adalah kolaborasi 5 (Lima Unsur) unsur subjek atau stakeholder pariwisata, yaitu: <i>Academician, Business, Community, Government</i> dan Media. Biasa disingkat ABCGM.	Hasil dai penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Dalam perencanaan awal wisata desa, masyarakat menjadi aktor inti untuk membangun konsep ini. Peran masyarakat setempat dalam perencanaan awal Desa Wisata Jasri di Yogyakarta Karang Asem, Bali terdiri dari (a) komitmen dan dukungan masyarakat; (b) menjaga kebersihan dan lingkungan, (c) meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan (d) mengeksplorasi potensi wisata lokal. Sementara itu ditahap pengembangan masyarakat akan bekerja pada (a) menyediakan pariwisata pendukung fasilitas; (b) membangun lembaga pendukung pariwisata; (c) memperkenalkan dan mempublikasikan Potensi wisata Jasri. (2) Dalam hal program pariwisata desa, peran pemerintah daerah adalah menentukan faktor dalam menciptakan program pengembangan dan sebagai aktor penting untuk mengimplementasikan dan memantau kegiatan untuk mencapai tujuan (Maulana: 2018). Pemerintah melibatkan mulai dari elemen dasar struktur pemerintahan yang ada administrasi desa (Lurah), Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Kepala Desa Bupati,

			<p>atau Walikota dan unsur resmi Pemerintah Daerah dan posisi tertinggi adalah menteri adalah Menteri Pariwisata, Menteri desa, pengembangan, dan transmigrasi, Menteri Pemberdayaan Perempuan.</p> <p>(3) Selain sebagai penyokong dana, para investor atau pengusaha yang berasal dari Desa Jasri memiliki juga memainkan peran penting, seperti mengusulkan gagasan pengembangan pariwisata di Desa Pakraman, Jasri, memberi motivasi, persiapan akomodasi, mempromosikan Desa Wisata Jasri, dan menyediakan umpan balik dari tempat-tempat wisata baru yang inovatif.</p> <p>(4) Peran akademik dalam hal ini adalah program pendampingan rumah tangga. Aksi ini merupakan kerjasama antara Universitas PGRI Semarang dengan BAPEDA dari Kabupaten Kendal. Industri rumah tangga juga diharapkan memiliki peran dalam pengembangan Kabupaten Tanjungsari. Pengolahan ikan ditetapkan sebagai daya tarik wisata utama bagi program wisata pendidikan di Tanjungsari.</p> <p>(5) Satu kasus di Desa Lopati memberi informasi tentang keberadaan pelaku wirausaha. Ada 17 jenis bisnis dengan 47 pengusaha, dan 34 orang yang berpartisipasi dalam menyediakan</p>
--	--	--	---

			<p>homestay bagi wisatawan di Desa Lopati. Berdasarkan temuan pengusaha yang disebutkan dalam penelitian itu diklasifikasikan sebagai bisnis pengusaha. Akibatnya, semua penelitian yang diteliti tidak ada bukti ituperan wirausahawan sosial ada di desa wisata.</p>
11	<p>Nuray Turker, Faruk Alaeddinoglu, dan Ali Selcuk Can, 2016, <i>The Role of Stakeholders in Sustainable Tourism Development in Safranbolu, Turkey</i>. (HLST-Summer July 12-14, 2016, Kyoto, Japan, ISSN 2309-3757)</p>	<p>Deskriptif Kualitatif. Konsep-konsep Pariwisata Berkelanjutan menurut Burn dan Holden. Adapun prinsip-prinsip dari pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjaga kualitas lingkungan, 2) Memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal dan wisatawan, 3) Menjaga hubungan antara pariwisata dengan lingkungan, 4) Menjaga keharmonisan antara masyarakat lokal, kebutuhan wisatawan dan lingkungan, 5) Menciptakan kondisi yang dinamis yang disesuaikan dengan <i>carrying capacity</i>, dan 6) Semua stakeholders harus bekerja sama didasari oleh misi yang sama untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan. 	<p>Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab paling penting untuk pariwisata berkelanjutan pengembangan dan harus memimpin pemangku kepentingan lain dalam pembangunan itu karena mereka adalah pemilik peran paling kuat; mereka memiliki peran melestarikan bangunan dan perencanaan warisan pariwisata berkelanjutan. Pengusaha pariwisata juga menyatakan bahwa mereka memiliki tanggung jawab dalam melestarikan bangunan cagar budaya dengan memulihkan atau merenovasi hotel mereka. Penduduk setempat memilikitanggung jawab untuk melestarikan budaya lokal dan mempertahankannya untuk masa depan masyarakatdan untuk pariwisata. (2) Semua pemangku kepentingan menekankan pelestarian bangunan bersejarah dan mempertahankan lokal budaya karena itu penting untuk keberlanjutan tujuan dan ini adalah intinya input pariwisata. Stakeholder

			<p>percaya bahwa Kotamadya Safranbolu harus mengambil peran utama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan karena diyakini bahwa pemerintah kota "<i>chief executive officer</i>" kota. Otoritas lokal seringkali merupakan tempat terbaik untuk itu membangun pariwisata berkelanjutan, menetapkan strategi, dan menyeimbangkan kepentingan pariwisata perusahaan, turis, dan penduduk setempat.</p> <p>(3) Semua pemangku kepentingan menyadari pentingnya industri pariwisata dan STD untuk masa depan tujuan. Berkelanjutan pariwisata dianggap sebagai konsep pengembangan yang paling tepat. Semua pemangku kepentingan berusaha berkontribusi pada STD untuk memberikan pengalaman berkualitas tinggi bagi wisatawan, dan mereka berfokus pada pendekatan jangka panjang yang lebih hati-hati untuk memastikan bahwa anak-anak kita dapat menikmati kualitas hidup.</p>
12	Nguyen Thi Bich Thuy, Ngoc Tuan Chau, dan Le Xuan Sang Vo, 2018, <i>Applying Network Analysis in Assessing Stakeholders' Collaboration for Sustainable Tourism</i>	<p>Deskriptif Kualitatif.</p> <p>Analisis jaringan aktor skala enam tingkat Mandell (1999). Dalam sebuah jaringan komunikasi terdiri atas beberapa elemen penting diantaranya yaitu :</p> <p>1) Aktor (node) tidak selalu berupa individu, bisa juga organisasi,</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :</p> <p>1) Tingkat keterkaitan antara tiga sektor (sektor publik - industri pariwisata -komunitas lokal) pada struktur jaringan tujuan Danang masih rendah. Jumlah hubungan antara tiga sektor saat ini pada tingkat rata-rata, dan kegiatan kerjasama belum mencapai nilai dua (linkage</p>

	<p><i>Development: A Case Study at Danang, Vietnam. (International Journal Tourism Policy, Vol. 8, No. 3, 2018)</i></p>	<p>negara, institusi dan sebagainya (Scott, Baggio dan Cooper, 2008).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Link (edge) relasi antar aktor yang dilambangkan dalam satu garis yang menghubungkan antar aktor, 3) Komponen adalah pengelompokan aktor yang sekurangnya mempunyai satu link dalam jaringan, 4) Klik adalah pengelompokan aktor yang ditandai dengan adanya relasi antar aktor secara lengkap dan maksimal, 5) Bridges adalah jembatan yang menghubungkan dua kelompok terpisah dalam suatu jaringan, 6) Hubs adalah merujuk kepada aktor yang mempunyai koneksi paling banyak dalam jaringan (Golbeck, 2013), 7) Cutpoints adalah aktor yang menjadi perekat dari jaringan, bila tidak ada aktor tersebut maka jaringan akan terpecah (Borgatti dan DeJody, 2013), 8) Pemencil (isolate) adalah aktor yang tidak mempunyai satu pun link dengan aktor lain dalam jaringan. 	<p>bisnis). Ada banyak aktor yang berada di tepi jaringan. Hubungan antara aktor dalam tigasektor-sektornya terpisah-pisah, dan di sana tidak ada lagi yang membawa aktor di antaranya. Organisasi di setiap sektor cenderung untuk mengatur hubungan bersama untuk membentuk kelompok, dan hubungan antara organisasi dalam industri pariwisata dan komunitas lokal lebih banyakerat daripada sektor publik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Hubungan antar kelompok dalam jaringan tidak sama: sementara ada hubungan yang cukup kohesif antara sektor swasta dan masyarakat, hubungan antara masyarakat dan pemerintah longgar. Hubungan kohesif yang tinggi antara sektor swasta dan masyarakat karena manfaat ekonomi yang lebih tinggi melalui kerja sama dalam kegiatan inti seperti pengembangan, pemasaran, dan distribusi produk dan layanan pariwisata. Stakeholder dalam dua sektor ini, bagaimanapun, tidak tertarik untuk bekerja sama dalam kegiatan kritis seperti itusebagai perencanaan dan pengelolaan tujuan untuk menciptakan kompetensi inti yang meningkatkan keunggulan kompetitif tujuan. Hubungan antara pemerintah dan sektor-sektor lain bersifat longgar dan utamanya melayani tujuan memberikan
--	---	---	--

			<p>informasi tentang kebijakan peraturan untuk kegiatan pariwisata. Peran penting sektor publik dalam pemasaran dan mengelola untuk tujuan belum diakui dengan baik oleh para pemangku kepentingan dalam hal ini sektor.</p> <p>3) Aktor utama dalam jaringan Pengembangan pariwisata di Danang adalah organisasi dalam industri pariwisata. Aktor-aktor kunci dalam jaringan tujuan Danang adalah organisasi-organisasi di wilayah Indonesia akomodasi, layanan katering, perantara pariwisata, dan transportasi. Kunci ini para aktor akan menjadi perantara yang mendukung untuk menghubungkan area dengan kelemahan di dalamnyakegiatan, organisasi bisnis baru, dan area keterhubungan yang lebih sedikit. Aktor-aktor kunci ini juga memegang arus informasi penting dari para wisatawan dan sumber daya yang dialokasikan dari manajemen negara, memiliki kekuatan dan mempengaruhi perencanaan kebijakan proyek pengembangan, investasi infrastruktur, dan pariwisata. Mereka bisa berbagi informasi, keandalan dan interoperabilitas dengan anggota jaringan lainnya (Schaffer dan Lawley, 2012; Chiappa and Presenza, 2013). Hasil ini mirip dengan mereka yang dalam studi Ying (2010), Bell dan Morse (2004), dan mengkonfirmasi</p>
--	--	--	--

			<p>temuan Timur dan Getz (2009) bahwa DMO memainkan peran sentral di AS dan Kanada dengan akses penuh atau kepemilikan sumber daya paling penting di tujuan-tujuan ini.</p>
13	<p>Hiroaki Saito dan Lisa Ruhanen, 2017, <i>Power in Tourism Stakeholder Collaborations: Power Types and Power Holders</i>. (Journal of Hospitality and Tourism Management)</p>	<p>Deskriptif Kualitatif. Teori Kolaboratif Governance menurut Ansell dan Grash (2007). Menurut pendapat Ansell dan Grash “<i>Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actor work collectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods</i>”(Ansell dan Gash, 2007:545). <i>Collaborative Governance</i> dapat dikatakan sebagai salah satu dari tipe governance. Konsep ini menyatakan akan pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik dan aktor privat (bisnis) bekerja sama dengan cara dan proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik atau, masyarakat.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :</p> <p>1) Empat jenis kekuatan bisa berbeda diidentifikasi dalam kolaborasi pemangku kepentingan tingkat organisasi di Indonesia manajemen destinasi pariwisata. Kekuatan-kekuatan ini termasuk pemaksaan, sah, diinduksi dan kompeten. Kekuatan koersif ditemukan dimiliki oleh badan-badan pemerintah dan sektor publik dan tenaga melalui implementasi kebijakan atau penerapan peraturan hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya. Kekuatan yang sah dapat diidentifikasi dalam badan puncak industri untuk pariwisata, DMO, maskapai penerbangan dan / atau bandaraperausahaan, media / penerbit dan sejumlah besar organisasi. Untuk menggunakan kekuatan yang sah, dalam studi kasus ini, mereka para pemangku kepentingan memanfaatkan posisi formal mereka untuk memimpin berbagai industri seminar, kampanye promosi, dan acara di tempat tujuan.</p>

			<p>2) Kekuatan yang diinduksi dapat dilihat pada para pemangku kepentingan dengan substansial sumber daya keuangan yang mereka miliki, yang mencakup ketiga tingkatan pemerintahan (federal, negara bagian dan lokal). Kelompok-kelompok ini dapat dilihat untuk mengerahkan kekuatan mereka dengan, misalnya, menyediakan dana untuk pemangku kepentingan lain untuk melakukan kegiatan pariwisata setempat. Akhirnya, kekuatan yang kompeten dapat dilihat dalam organisasi penelitian, perusahaan konsultan dan lembaga pendidikan (universitas dan sekolah kejuruan) diberikan melalui pemberian dukungan untuk mengembangkan program atau produk pariwisata di daerah setempat yang memiliki pengaruh pada bagaimana pemangku kepentingan lainnya mengoperasionalkan kegiatan.</p>
--	--	--	---

1.6.2. Administrasi Publik

Istilah Administrasi Publik (*administration of public*) memperlihatkan bagaimana peran pemerintah sebagai agen tunggal yang berkuasa aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil keputusan dan prakarsa, penting atau baik menurut mereka untuk masyarakat karena masyarakat diasumsikan sebagai pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur oleh pemerintah (Keban, 2014: 4).

Selanjutnya, istilah administrasi publik merupakan konsep yang sangat berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat karena pemerintah memberi kesempatan tersebut kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah lebih mengarah kepada “*empowerment*” yaitu pemerintah berupaya memfasilitasi agar masyarakat mampu mengatur hidupnya tanpa bergantung sepenuhnya kepada pemerintah. Dengan dilakukannya hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, mulai dari penentuan kebutuhan sampai pelaksanaan dan penilaian hasil, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator, dan dapat memfokuskan diri pada urusan-urusan negara yang bersifat strategis (Keban, 2014: 4-5).

Sedangkan Henry, dalam Keban (2014: 6) administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosikan pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik

agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan efektifitas, efisiensi, dan pemenuhan secara lebih baik kebutuhan masyarakat. Definisi ini melihat administrasi publik merupakan kombinasi teori dan praktek yang mencampuri proses manajemen dengan pencapaian nilai-nilai normatif dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi administrasi publik diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan publik berdasarkan pertimbangan saran dari masyarakat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip manajemen agar kebijakan yang dihasilkan efektif dan efisien bagi masyarakat.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan ilmu pengetahuan yang dinamis dan telah mengalami perubahandan pembaharuan dari waktu ke waktu sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Paradigma yang muncul merupakan sudut pandang ahli tentang perananan dan tantangan administrasi publik dalam menjawab masalah yang muncul. Nicholas Henry (1989), dalam Keban (2008) mengemukakan 6 paradigma didalam disiplin ilmu administrasi publik yaitu sebagai berikut:

a. Dikotomi Politik-Administrasi (1900-1926)

Asumsi dari paradigma ini adalah gagasan pemisahan politik dan administrasi sebagai cara untuk menentukan efisiensi dan efektivitas. Woodrow Wilson (1897) menyatakan empat persyaratan administrasi publik yang efektif yaitu; (1) Pemisahan politik dan administrasi, (2) Analisis komparatif dari organisasi politik dan swasta, (3) Meningkatkan efisiensi dengan praktik dan sikap seperti bisnis terhadap operasi sehari-hari, (4) Meningkatkan efektivitas layanan publik melalui manajemen dan pelatihan pegawai negeri sipil, serta mendorong penilaian berbasis prestasi. Pemerintah harus apolitis karena dalam melayani publik harus tidak mendukung kepentingan politik tertentu. Kekurangan dari paradigma ini yaitu hanya ditekankan pada aspek lokus yaitu birokrasi pemerintah tetapi fokus dalam administrasi publik kurang dibahas secara jelas dan rinci.

b. Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Prinsip-prinsip administrasi yang bersifat universal yang dapat diterima di mana saja dan kapan saja. Gullick dan Urwick (1937) menyatakan tujuh prinsip administrasi yaitu *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting (POSDCORB)*. Lokus dari paradigma ini tidak pernah diungkapkan secara jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip tersebut dapat berlaku di mana saja termasuk di pemerintahan, dengan demikian dalam paradigma ini fokus lebih ditekankan daripada lokusnya.

c. Administrasi Publik Sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Menurut Herbert Simon, politik dan administrasi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pada periode ini merupakan suatu upaya untuk membangun kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dengan ilmu politik. Dalam paradigma ini, administrasi publik sebagai ilmu politik dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan. Sedangkan fokusnya menjadi kabur. Pada masa ini, administrasi publik mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap disiplin yang sangat dominan dalam dunia Administrasi Publik.

d. Administrasi Publik Sebagai Manajemen (1956-1970)

Istilah administrasi disini diartikan sebagai segala studi di dalam organisasi dan ilmu manajemen, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas program-program secara lebih tepat. Disini fokus lebih dipentingkan daripada lokusnya.

e. Administrasi Publik Sebagai administrasi Publik (1970-sekarang)

Dalam paradigma ini, administrai publik telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi dan kebijakan publik. Lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan publik. Teori organisasi menjelaskan :

1. Bagaimana dan mengapa organisasi bekerja.
2. Bagaimana dan mengapa organisasi bertindak.
3. Bagaimana dan mengapa keputusan dibuat.

f. *Governance* (1990-sekarang)

Paradigma ini menekankan perubahan persepsi pemerintah dan administrasi. Menurut J.S Endarlin bahwa *governance* merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk menggantikan istilah *government*, yang menunjukkan penggunaan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan. Istilah ini secara khusus menggambarkan perubahan peranan pemerintah dari pemberi pelayanan kepada enabler atau fasilitator, dan perubahan kepemilikan yaitu dari milik negara menjadi milik rakyat. (Dharma, 2002 : 223).

Menurut Rachhman Achwan, konsep *good governance* pada mulanya muncul akibat gelombang besar demokrasi dan ekonomi pasar berskala global yang mendorong pentingnya meletakkan dengan sejajar peran institusi makro, yakni : Negara, pasar (ekonomi) dan masyarakat sebagai mitra dalam membangun *good governance*. Paradigma tersebut merupakan revisi dari paradigma lama (*rule government*), dimana menurut paradigma *rule government* lebih senantiasa menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Martin Jimung, 2005 : 95-96).

Dari keenam paradigma administrasi publik di atas, penelitian mengenai peranan aktor dalam pengembangan desa wisata ini masuk dalam paradigma keenam, yaitu *Governance*. Hal ini sesuai dengan konsep bahwa penyelenggaraan *good governance* dalam pelaksanaannya menuntut

keterlibatan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat dan dapat segera diwujudkan manakala pemerintah didekatkan dengan yang diperintah. Pemerintah yang didekatkan dengan yang diperintah berarti desentralisasi dan otonomi. (Joko Widodo, 2001 : 29). Elemen-elemen dalam kebijakan publik termasuk di dalamnya adalah aktor yang terlibat, oleh karenanya, penelitian mengenai peranan aktor implementasi kebijakan yang tidak lagi berpusat hanya pada pemerintah saja, tetapi melibatkan aktor lain, seperti masyarakat, swasta, dan lain lain sangat relevan dengan paradigma keenam ini, yaitu Paradigma *Governance*.

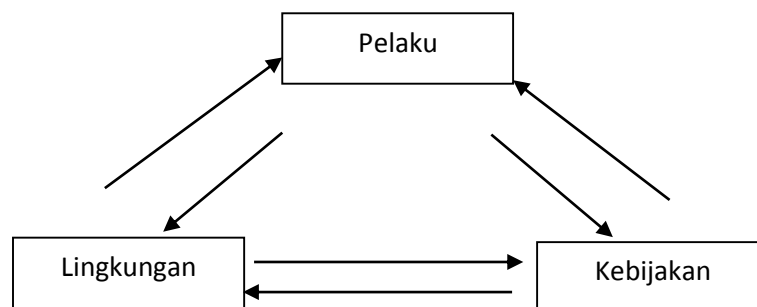
1.6.4 Kebijakan Publik

Kebijakan publik tidak bisa terlepas dari actor pembuat kebijakan itu sendiri, karena pengertian kebijakan sendiri merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Kebijakan publik kerap menyertakan partisipasi masyarakat guna menghasilkan keputusan yang terbaik. Kebijakan publik menjadi penting apabila kebijakan tersebut dijalankan atau implementasikan. Udoji (dalam Wahab,1997:59) mengatakan bahwa “*The execution of policies is a important if not more important than policy-making Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they areimplemented*”.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah

mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Bila kebijakan dipandang sebagai sebuah sistem, maka kebijakan memiliki elemen-elemen pembentuknya. Menurut Thomas R. Dye dalam Dunn (2000: 110) terdapat tiga elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan. Dye menggambarkan ketiga elemen kebijakan tersebut sebagai kebijakan publik/*public policy*, pelaku kebijakan/*policy stakeholders*, dan lingkungan kebijakan/*policy environment*.

Gambar 1. 1 Tiga Elemen Sistem Kebijakan



Sumber: Thomas R. Dye dalam Dunn (2000:110)

Ketiga elemen ini saling memiliki andil, dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri.

Tahapan kebijakan publik sebagaimana dikemukakan oleh Dunn (dalam Yeremias T. Keban, 2014: 67) terdiri dari penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan

(*policy adoption*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan penilaian kebijakan (*policy assesment*).

- a. Agenda kebijakan, dalam tahap ini dilakukan penentuan apa yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan.
- b. Formulasi kebijakan, para analisis mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah.
- c. Adopsi kebijakan, merupakan tahap dimana ditentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para administrator dan legislatif.
- d. Implementasi kebijakan, merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi tersebut dilaksanakan oleh unit-unit administratif tertentu dengan memobilisasikan dana dan sumber daya yang ada.
- e. Penilaian kebijakan, dalam tahap ini dilakukan penilaian apakah semua proses implementasi telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau tidak.

Kebijakan publik menurut Anderson (dalam Agustino, 2016:3) dipelajari dalam rangka untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam mengenai proses kebijakan. Proses kebijakan sendiri adalah serangkaian alur yang perlu dilalui untuk memahami gejala atau fenomena yang perlu diselesaikan oleh sebuah atau lebih kebijakan publik. Proses kebijakan meliputi asal atau akar masalah, proses penyelesaian masalah, perkembangan setelah masalah disikapi, dan akibat yang ditimbulkan oleh masalah bagi masyarakat. Untuk tujuan ilmiah, kebijakan publik dapat dipandang baik sebagai variabel terikat maupun variabel bebas.

Variabel terikat manakala perhatian kebijakan tertuju pada faktor publik dan lingkungannya yang mempengaruhi atau menentukan konten kebijakan, sejauh mana kebijakan dapat dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan antara kelompok-kelompok penekan atau kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat dan instansi pemerintah. Kebijakan publik sebagai variabel bebas ketika kebijakan berdampak terhadap sistem politik dan lingkungan sekitarnya, apakah kebijakan partai politik mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap sistem politik, serta sejauh mana dampak kebijakan publik atas kesejahteraan sosial warga.

Dari beberapa pengertian yang telah dibahas di atas, terdapat korelasi bahwa kebijakan publik adalah suatu program kegiatan yang mana program kegiatan tersebut ditujukan kepada layanan publik dalam hal ini masyarakat selaku sasaran dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik di sini bersifat terstruktur, dan dapat direalisasikan dengan cara-cara sesuai isi dari kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan merupakan satu tahap dalam kebijakan publik yang sangat krusial, meskipun memang setiap kebijakan mengandung risiko kegagalan yang tinggi. Ada dua kategori pengertian kegagalan kebijakan sebagaimana diungkapkan oleh Hogwood dan Gun (dalam Sumaryadi, 2013:84) yakni *non-implementation* atau tidak terimplementasikan dan kategori *unsuccessful implementation* atau implementasi yang tidak berhasil. *Non-implementation* berarti suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana, mungkin karena pihak yang

terlibat dalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama atau telah bekerja sama secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang diselesaikan di luar jangkauan kekuasaannya sehingga betapa pun gigihnya usaha mereka hambatan yang ada tidak sanggup ditanggulangi. Akibatnya, implementasi yang efektif sukar dipenuhi. Dari penjelasan di atas menunjukkan sangat penting adanya untuk memerhatikan proses Implementasi kebijakan publik, hal ini sesuai dengan pendapat ahli bahwa oleh karenanya peneliti tertarik untuk membahas implementasi kebijakan yang lebih khusus mengenai aktor dalam implementasi kebijakan publik.

1.6.5. Implementasi Kebijakan Publik

Tahap implementasi kebijakan publik dilakukan untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan dalam formulasi kebijakan. Dalam formulasi kebijakan harus termuat tujuan dan sasaran kebijakan secara tepat dan jelas. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan dapat dilakukan setelah undang-undang ditetapkan dan dana sudah dianggarkan untuk membiayai proses implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus mencapai tujuannya dan menciptakan dampak yang sebaik-baiknya. Oleh karenanya, proses implementasi kebijakan harus sangat diperhatikan demi mencapai tujuan dan dampak yang diinginkan. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor,

organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, keluaran (*output*) maupun sebagai dampak (*outcome*).

Ripley dan Franklin (dalam Budi Winarno, Buku Kebijakan Publik 2005 : Halaman 149-160) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi merujuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat publik. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Selanjutnya Van Meter Van Horn (dalam Budi Winarno, buku Kebijakan Publik 2002;halaman 102) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III.

Dalam teori ini dikatakan bahwa implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). (George III Edwards : *Implementing Public Policy*, 1980). Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab (1997:71-78) , yaitu:

- a) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d) Kebijaksanaan yang akan di implementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.

- e) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f) Hubungan saling ketergantungan kecil.
- g) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- i) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Dalam Teori Jaringan Aktor, Yuniningsih (2018) mengemukakan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Nilai (individu, organisasi, professional, legal, dan kepentingan umum) yang ada dan dibawa oleh masing-masing aktor.
- 2) Komunikasi, artinya seberapa intens atau sering antar aktor saling berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama baik lisan maupun tertulis dalam rangka mencapai tujuan bersama.
- 3) Kepercayaan, artinya kepercayaan dari masing-masing aktor untuk menjalin hubungan dengan aktor lain untuk mencapai tujuan atau kepentingan yang sama.
- 4) Sumber kebijakan, artinya bagaimana kebijakan atau regulasi yang ada dalam mewadahi hubungan antar aktor atau jaringan yang terbentuk dalam rangka mewujudkan tujuan bersama.

1.6.6. Aktor dalam Implementasi Kebijakan

Dalam tahapan implementasi, terdapat berbagai aktor yang terlibat. Mereka bisa berasal dari kalangan pemerintah maupun masyarakat, dan diidentifikasi dari kalangan birokrasi, legislatif, lembaga peradilan, kelompok-kelompok penekan dan organisasi komunitas (Anderson, 1979; Lester dan Stewart, 2000 dalam Solahuddin K, 2009:100).

a. Birokrasi

Pada umumnya birokrasi dipandang sebagai agen administrasi yang paling bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. Pandangan ini berlaku untuk implementasi kebijakan negara maju maupun negara yang sedang berkembang (NSB). Birokrasi mempunyai wewenang yang besar untuk sepenuhnya menguasai "area" implementasi kebijakan dalam wilayah operasinya karena mereka mendapat mandate dari lembaga legislatif.

b. Organisasi Komunitas

Lembaga lain yang sering terlibat dalam implementasi kebijakan adalah organisasi-organisasi komunitas. Banyak program-program yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan politik yang berlabel pro pembangunan masyarakat (*community development*). Dengan sendirinya masyarakat baik secara individual maupun kelompok terlibat dalam implementasi program itu baik sebagai objek ataupun subjek program.

c. Badan Legislatif

Walaupun birokrasi merupakan aktor utama dalam implementasi kebijakan publik, sejumlah aktor lain dan lembaga juga terlibat di dalam prosesnya. Aktor selain birokrasi adalah legislatif maupun lainnya. Lembaga legislatif juga dapat terlibat dalam implementasi kebijakan ketika mereka ikut menentukan berbagai peraturan yang spesifik dan mendetail.

d. Lembaga Peradilan

Di samping legislatif, lembaga peradilan juga merupakan aktor dalam implementasi kebijakan. Lembaga peradilan merupakan cabang yudisial yang menangani hukum politik. Namun, lembaga peradilan dapat terlibat dalam implementasi kebijakan ketika muncul tuntutan masyarakat atas kebijakan tertentu yang implementasinya dianggap merugikan masyarakat sehingga menjadi perkara hukum.

e. Kelompok Kepentingan

Aktor lainnya yang berperan dalam implementasi adalah kelompok-kelompok penekan (*pressure groups*). Karena dalam implementasi berbagai diskresi banyak dilakukan oleh birokrasi, maka banyak kelompok-kelompok kepentingan yang ada di masyarakat berusaha memengaruhi berbagai peraturan implementasi seperti pedoman acuan atau regulasi-regulasi. Tindakan kelompok-kelompok kepentingan menekan kebijakan pemerintah (karena itu disebut

kelompok penekan) dimaksudkan agar mereka memperoleh keuntungan dengan adanya implementasi program tertentu.

Menurut Howlett dan M. Ramesh {Howlett dan Rames (1995), dalam Suwitri(2011)} mengemukakan bahwa aktor kebijakan (*policy aktor*) merupakan *policy subsystem* yang berada dalam jejaring kebijakan antara *organization of the international system*, *organization of the society* dan *organization of the state*. Aktor kebijakan terdiri atas : 1) *elected officials* yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, 2) *appointed officials* atau pejabat politik yang ditunjuk oleh pejabat politik terpilih untuk duduk dalam birokrasi, 3) *interest group*, 4) *research organization*, 5) media massa. Aktor-aktor tersebut saling berinteraksi untuk memberikan persetujuan (pro) maupun ketidaksetujuan (kontra) terhadap suatu kebijakan. Pendapat lain dikemukakan Cobb dan Elder (1972 dalam Wayne Parsons, 1997: 128, 2005: 131).

Selain teori tersebut di atas, menurut Arif Yahya (dalam Tri Yuniningsih, 2019) dalam implementasi kebijakan terdapat Model *Pentahelix* yang menjelaskan peran aktor dalam implementasi kebijakan. Yang dimaksud *Pentahelix* menurut Arif Yahya (dalam Tri Yuniningsih, 2019) adalah kolaborasi 5 (Lima) unsur subjek atau *stakeholder* pariwisata, yaitu: *Academician*, *Business*, *Community*, *Government* dan *Media*. Biasa disingkat ABCGM.

Menurut Soemaryani (2016) Model *Pentahelix* merupakan referensi dalam mengembangkan sinergi antara instansi terkait di dalam mendukung

seoptimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Rampersad, Quester, & Troshani, dalam Halibas, Sibyan, dan Maat (2017) bahwa kolaborasi *Pentahelix* mempunyai peran penting untuk bermain di dalam mendukung tujuan inovasi bersama dan *Pentahelix* berkontribusi terhadap kemajuan sosial ekonomi daerah.

1) Pemerintah (*Government*)

Government pada umumnya birokrasi dipandang sebagai agen administrasi yang paling bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan. Pandangan ini berlaku untuk implementasi kebijakan negara maju maupun negara yang sedang berkembang (NSB). Birokrasi mempunyai wewenang yang besar untuk sepenuhnya menguasai “area” implementasi kebijakan dalam wilayah operasinya karena mereka mendapat mandat dari lembaga legislatif.

2) Swasta (*Business*)

Sebagai *entrepreneur* harus dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis untuk mencapai tujuan bisnis yaitu : *profit, people, planet, sustainability* serta tumbuh dan berkembang dari skala mikro, kecil, menengah, dan besar. Sudah saatnya *entrepreneur* untuk memanfaatkan konsep yang dihasilkan oleh para akademisi dengan seminar dan diskusi.

3) Akademisi (*Academician*)

Lembaga lain yang sering terlibat dalam implementasi kebijakan adalah akademisi. Banyak program-program yang dirancang untuk

melaksanakan kebijakan-kebijakan politis yang berlabel pro pembangunan masyarakat (*community development*). Para akademis memiliki kepakaran dan sebagai lembaga penelitian maka memiliki peran yang penting. Dengan sendirinya akademisi akan turut terlibat dalam implementasi kebijakan.

4) Masyarakat (*Community*)

Community, aktor lainnya yang berperan dalam implementasi adalah kelompok-kelompok atau komunitas. Karena dalam implementasi berbagai diskresi banyak dilakukan oleh birokrasi, maka banyak kelompok-kelompok yang ada di masyarakat berusaha mempengaruhi berbagai peraturan implementasi seperti pedoman acuan atau regulasi-regulasi. Tindakan kelompok-kelompok dimaksudkan agar mereka memperoleh keuntungan dengan adanya implementasi program tertentu.

5) Media Massa

Media Massa, merupakan penghubung penting antara negara dan masyarakat, perpaduan reporter pasif dan analis aktif memiliki tempat tersendiri dalam proses kebijakan publik untuk memberikan ruang bagi pemerintah dan masyarakat dalam memahami masalah sosial sekaligus untuk memecahkan permasalahan sosial tersebut.

1.6.7. Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan

Thompson dalam Kadir (2014:51) mengungkapkan bahwa peran aktor dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program dipengaruhi oleh

kekuatan (*power*) dan kepentingan (*interest*) yang dimiliki oleh aktor tersebut, sehingga dapat dikategorikan menjadi 4 jenis yaitu:

1. Aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) yang tinggi tetapi memiliki kekuatan (*power*) yang rendah diklasifikasikan sebagai Subyek (*Subjects*). Aktor ini memiliki kapasitas yang rendah dalam pencapaian tujuan, akan tetapi dapat menjadi berpengaruh dengan membentuk aliansi dengan aktor lainnya. Aktor ini sering bisa sangat membantu sehingga hubungan dengan aktor ini harus tetap dijaga dengan baik.
2. Aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan kekuatan (*power*) yang tinggi diklasifikasikan sebagai Pemain Kunci (*Key Players*). Aktor ini harus lebih aktif dilibatkan secara penuh termasuk dalam mengevaluasi strategi baru.
3. Aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan kekuatan (*power*) yang rendah diklasifikasikan pengikut lain, untuk melibatkan aktor ini lebih jauh karena kepentingan dan pengaruh yang dimiliki biasanya berubah seiring berjalannya waktu. Aktor ini harus tetap dimonitor dan dijalin komunikasi dengan baik.
4. Aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) yang rendah tetapi memiliki kekuatan (*power*) yang tinggi diklasifikasikan sebagai pendukung (*contest setters*). Aktor ini dapat mendatangkan resiko sehingga keberadaannya perlu dipantau dan dikelola dengan baik. Aktor ini dapat berubah menjadi *key players* karena suatu

peristiwa. Hubungan baik dengan stakeholder ini terus dibina. Untuk itu segala informasi yang dibutuhkan harus tetap diberikan sehingga mereka dapat terus berperan aktif dalam pencapaian tujuan.

Sebagaimana dinyatakan terdahulu bahwa keterlibatan aktor dalam proses kebijakan tidaklah bebas nilai atau bebas dari kepentingan. Nilai adalah sesuatu yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Para aktor baik yang berasal dari kalangan pemerintah atau non pemerintah terlibat dengan persoalan nilai dalam proses kebijakan (Islamy,2000).

Mengacu pada pendapat Viney (dalam Suwitri, 2011), aktor atau *stakeholders* dapat dipilah ke dalam 4 kategori yaitu :

- a) Primer, yaitu aktor dengan pengaruh yang tinggi dan mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi, untuk merekrut aktor kategori ini dengan cara partner.
- b) Sekunder, yaitu aktor dengan pengaruh yang tinggi tetapi tingkat kepentingan yang rendah, untuk merekrut aktor kategori ini dengan cara *consult*.
- c) Tersier, yaitu aktor dengan pengaruh yang rendah tetapi memiliki kepentingan yang tinggi, untuk merekrut aktor kategori ini dengan cara inform.
- d) Kwarter, yaitu aktor dengan pengaruh dan kepentingan yang rendah, untuk merekrut aktor kategori ini dengan cara kontrol.

1.6.8. Teori Peran

Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bercermin sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu (Sarwono, 2013:215).

Menurut Robert Linton (1936), teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama kita untuk menuntun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut.

Kedudukan aktor dalam peranannya menurut Nugroho (dalam Fitri & Hardi, 2017) aktor dalam program pembangunan diklasifikasikan menurut kedudukannya, adalah :

- a. Pembuat kebijakan (*Policy Creator*) ialah pemangku kepentingan yang berfungsi selaku pengambil keputusan serta penentu sesuatu kebijakan

- b. Koordinator ialah pemangku kepentingan yang berfungsi mengkoordinasikan pemangku kepentingan terkait lainnya
- c. Fasilitator ialah pemangku kepentingan yang berfungsi untuk mewedahi serta memenuhi kebutuhan kelompok sasaran
- d. Pelaksana (Implementor) ialah pemangku kepentingan yang melakukan kebijakan termasuk kelompok sasaran
- e. Akselarator merupakan pemangku kepentingan yang berfungsi dalam percepatan serta berkontribusi supaya program bisa berjalan sesuai dengan tujuan, bahkan bisa menggapai tujuan dengan lebih cepat.

Soekanto (2007: 213), mengungkapkan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2013:224), menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Hal ini senada dengan Suhardono (1994:15), mendefinisikan bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa peran merupakan seperangkat perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh

seseorang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya serta tindakan tersebut sangat diharapkan oleh banyak orang.

1.6.9. Pariwisata

Pariwisata adalah kebutuhan manusia diseluruh dunia, sehingga dengan meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa dalam bidang ekonomi, maka muncul sifat manusia untuk melakukan perjalanan untuk sementara meninggalkan rutinitas ditempat tinggal mereka untuk mencari keseimbangan, keserasian dan kebahagiaan hidupnya. (Gamal Suwanto,1997).

Pada hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempata tinggal. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar (Gamal Suwanto, 1997:3).

Pariwisata adalah suatu gejala yang sangat kompleks di dalam masyarakat, yang oleh karena itu pariwisata kini berkembang menjadi suatu subjek pengetahuan yang pantas dibahas secara ilmiah. (I Gde.P dan I Ketut.S.D, 2009:3). Pariwisata itu, perjalanan untuk bersenang-senang, kalau tidak mencari kesenangan perjalanan itu tidak dapat disebut sebagai perjalanan wisata (Oka A.Yoeti, 2010:37). Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan objek dan daya

tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. (UUD No.9 Tahun 1990).

Menurut (Mac Intosh, 1995:55) dalam bukunya Oka Yoeti, Pariwisata adalah sejumlah gejala dan hubungan yang timbul, mulai dari interaksi antara wisatawan di satu pihak, perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan dan pemerintah serta masyarakat yang bertindak sebagai tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan yang dimaksud. Pada hakekatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya (Gamal Suwanto, 1997:3). Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun belajar.

1.6.10. Pengembangan Pariwisata

Pada dasarnya pengembangan pariwisata adalah suatu proses yang berkesinambungan untuk melakukan *matching* dan *adjustment* yang terus menerus antara sisi *supply* dan *demand* kepariwisataan yang tersedia untuk mencapai misi yang telah ditentukan (Nuryanti, 1994). Sedangkan pengembangan potensi pariwisata mengandung makna upaya untuk lebih meningkatkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu objek wisata dengan cara melakukan pembangunan unsur-unsur fisik maupun nonfisik dari sistem pariwisata sehingga meningkatkan produktivitas.

Potensi wisata menurut Mariotti dalam Yoeti (1983) adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata, dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Pengembangan kawasan wisata merupakan alternatif yang diharapkan mampu mendorong baik potensi ekonomi maupun upaya pelestarian. Pengembangan kawasan wisata dilakukan dengan menata kembali berbagai potensi dan kekayaan alam dan hayati secara terpadu.

Pada tahap berikutnya dikembangkan model pengelolaan kawasan wisata yang berorientasi pelestarian lingkungan (Ramly, 2007). Disamping itu untuk dapat melakukan pengembangan perlu memperhatikan berbagai aspek, suatu objek wisata yang akan dikembangkan harus memperhatikan syarat-syarat pengembangan daerah menjadi objek wisata yang dapat diandalkan, yaitu :

1. Seleksi terhadap potensi, hal ini dilakukan untuk memilih dan menentukan potensi objek wisata yang memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan dana yang ada.
2. Evaluasi letak potensi terhadap wilayah, pekerjaan ini mempunyai latar belakang pemikiran tentang ada atau tidaknya pertentangan atau kesalahpahaman antar wilayah administrasi yang terkait.
3. Pengukuran jarak antar potensi, pekerjaan ini untuk mendapatkan informasi tentang jarak antar potensi, sehingga perlu adanya peta potensi objek wisata.

1.6.11. Desa Wisata

Desa wisata merupakan pengembangan suatu wilayah desa yang pada dasarnya tidak merubah apa yang sudah ada akan tetapi lebih cenderung kepada pengembangan potensi desa yang ada dengan melakukan pemanfaatan

kemampuan unsur- unsur yang ada di dalam desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata dalam skala yang kecil menjadi rangkaian aktivitas atau kegiatan pariwisata dan mampu menyediakan serta memenuhi serangkaian kebutuhan perjalanan wisata baik dari aspek daya tarik maupun sebagai fasilitas pendukung.

Menurut Priasukmana & Mulyadin (2001), Desa Wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan dari suasana yang mencerminkan keaslian dari pedesaan itu sendiri mulai dari sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas dan dari kehidupan sosial ekonomi atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya.

Pengembangan pariwisata pedesaan didorong oleh tiga faktor. Pertama, wilayah pedesaan memiliki potensi alam dan budaya yang relatif lebih otentik daripada wilayah perkotaan, masyarakat pedesaan masih menjalankan tradisi dan ritual-ritual budaya dan topografi yang cukup serasi. Kedua, wilayah pedesaan memiliki lingkungan fisik yang relatif masih asli atau belum banyak tercemar oleh ragam jenis polusi dibandingkan dengan kawasan perkotaan. Ketiga, dalam tingkat tertentu daerah pedesaan menghadapi perkembangan ekonomi yang relatif lambat, sehingga pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal secara optimal merupakan alasan rasional dalam pengembangan pariwisata pedesaan.

Desa wisata adalah suatu kawasan atau wilayah pedesaan yang bisa dimanfaatkan atas dasar kemampuan beberapa unsur yang memiliki atribut produk wisata secara terpadu, dimana desa tersebut menawarkan keseluruhan suasana dari pedesaan yang memiliki tema keaslian pedesaan, baik dari tatanan segi kehidupan sosial budaya dan ekonomi serta adat istiadat yang mempunyai ciri khasarsitektur dan tata ruang desa menjadi suatu rangkaian kegiatan dan aktivitas pariwisata (Putra, 2006).

Sedangkan Nuryanti (1993) berpendapat bahwa desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Ditjenpar mendefinisikan desa wisata sebagai suatu wilayah perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, arsitektur bangunan dan tata ruang desa,serta mempunyai potensi untuk dikembangkan berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi wisata makanan dan minuman, cinderamata, penginapan, dan kebutuhan lainnya.

Berdasarkan atas beberapa pendapat para ahli di atas, dapat dijelaskan bahwa desa wisata merupakan suatu wilayah yang menjadi obyek wisata dimana area tersebut memiliki ciri khas contohnya seperti keasrian dan keindahan alamnya, seni budaya dan kebiasaan masyarakat sehari-hari yang mana para wisatawan dapat ikut terjun langsung merasakan kehidupan masyarakat di desa tersebut.

1.6.12. Pengembangan Desa Wisata

Salah satu yang menjadi suatu bentuk kegiatan ekowisata pada kawasan tertentu yang melibatkan masyarakat lokal setempat adalah desa wisata. Pengembangan Desa Wisata harus memperhatikan kemampuan dan tingkat penerimaan masyarakat setempat yang akan di kembangkan menjadi desa wisata. Hal ini di maksudkan untuk mengetahui karakter dan kemampuan masyarakat yang dapat di manfaatkan dalam pengembangan desa wisata, menentukan jenis dan tingkat pemberdayaan masyarakat secara tepat. Desa wisata biasanya berupa kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, sumberdaya alam dan lingkungan alam yang masih terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah kawasan desa wisata.

Selain berbagai keunikan tersebut, kawasan desa wisata juga dipersyaratkan memiliki berbagai fasilitas untuk menunjangnya sebagai kawasan tujuan wisata. Berbagai fasilitas ini akan memudahkan para pengunjung desa wisata dalam melakukan kegiatan wisata. Fasilitas-fasilitas yang seyogyanya ada disuatu kawasan desa wisata antara lain : sarana transportasi, telekomunikasi, kesehatan, dan akomodasi. Khusus untuk sarana akomodasi, desa wisata dapat menyediakan sarana penginapan berupa pondok-pondok wisata (*Home Stay*) sehingga para pengunjung dapat merasakan suasana pedesaan yang masih asli.

Menurut Nuryanti (1993), terdapat tiga konsep utama dalam komponen desa wisata yaitu :

- 1) Akomodasi, sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan unit-unit berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.
- 2) Atraksi, seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipan aktif seperti kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik. Dan yang ketiga adalah keindahan alam, keunikan dan kelangkaan.
- 3) Keindahan alam, keunikan dan kelangkaan desa wisata itu sendiri.

Menurut Sunaryo (2013), faktor pendukung dan penghambat suatu produk wisata (*tourism supply side*) yang biasanya berwujud sistem destinasi pariwisata akan terdiri atau menawarkan paling tidak beberapa komponen pokok sebagai berikut :

- 1) Faktor Pendukung.
 - a. Daya tarik wisata yang bisa berbasis utama pada alam, budaya atau minat khusus
 - b. Akomodasi atau amenitas, aksesibilitas dan transportasi (udara, darat, dan laut)
 - c. Fasilitas umum
 - d. Fasilitas pendukung pariwisata
 - e. Masyarakat sebagai tuan rumah (*host*) dari suatu destinasi.

2) Faktor Penghambat

- a. Belum dikelolanya dengan baik oleh pihak pemerintah yang berwenang dan belum tertatanya dengan baik aspek prasarana dan sarana yang sebenarnya dapat dijadikan daya dukung untuk pengembangan objek wisata di daerah.
- b. Keterbatasan prasarana dan sarana serta pengelolaan terhadap potensi wisata masih belum optimal. Hal tersebut merupakan dampak dari kurangnya alokasi anggaran dana yang diperuntukkan bagi pengembangan sektor pariwisata.

Menurut Gamal Suwanto (2003) dalam Yoeti (2010), unsur pokok yang harus ada untuk menunjang pengembangan desa wisata meliputi lima unsur sebagai berikut :

1) Obyek dan daya tarik wisata

Umumnya daya tarik suatu obyek wisata didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut : Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih, Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya., Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka, Adanya sarana/prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir, Obyek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi karena keindahan alam pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan, dan sebagainya, Obyek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

2) Prasarana wisata

Prasarana wisata merupakan sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang pasti dibutuhkan oleh wisatawan dalam kunjungannya di daerah tujuan wisata, seperti contohnya jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya.

3) Sarana Wisata

Sarana wisata adalah kelengkapan daerah tujuan wisata yang disiapkan untuk melengkapi kebutuhan wisatawan dalam melakukan kunjungan wisatanya. Contohnya dapat berupa hotel atau penginapan, biro perjalanan, alat transportasi, pusat pernak-pernik atau cindramata, rumah makan dan restoran serta sarana pendukung lainnya.

4) Infrastruktur

Infrastruktur merupakan suatu keadaan yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata baik itu yang berupa suatu pengaturan maupun bangunan fisik di atas permukaan tanah dan di bawah tanah contohnya seperti sistem pengairan, distribusi air bersih, sistem pembuangan air limbah, sumber listrik dan energi, sistem jalur angkutan dan terminal, sistem komunikasi dan sistem keamanan atau pengawasan.

5) Masyarakat

Ada tiga faktor yang terdapat di dalam masyarakat yaitu dari masyarakat sekitar obyek pariwisata, lingkungan yang merupakan lingkungan alam di sekitar obyek pariwisata, dan budaya yang ada pada masyarakat di dalam lingkungan pariwisata.

1.7. Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa saja yang akan digali lebih dalam oleh penulis dalam mendeskripsikan persoalan-persoalan di lapangan sebagai objek penelitian. Fenomena yang diamati yaitu tentang peran aktor dalam implementasi kebijakan pengembangan desa wisata Limbasari. Secara umum, aktor dalam pengembangan desa wisata Limbasari terdiri dari pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media massa. Fenomena penulisan digunakan agar mempermudah penulis dalam menemukan alur pikir dan penyesuaian teori tentang peran aktor dalam implementasi kebijakan yang telah dipaparkan oleh penulis. Sesuai dengan alat dan teori yang digunakan oleh peneliti, maka fenomena dan indikasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Identifikasi aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Limbasari dengan menggunakan Teori Pentahelix yang menerangkan bahwa unsur subjek atau *stakeholder* pariwisata terdiri dari *Academician, Business, Community, Government* dan *Media*. Biasa disingkat ABCGM.
- 2) Menganalisis peran dan memetakan aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Limbasari.
 - a. Dalam menganalisis peran, terdapat lima jenis peranan aktor dalam sebuah program pengembangan/pembangunan, yaitu:
 - 1) Pembuat kebijakan (*Policy Creator*)
 - 2) Koordinator

- 3) Fasilitator
 - 4) Pelaksana (*Implementor*)
 - 5) Akselarator
- b. Memetakan aktor-aktor yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Limbasari ke dalam beberapa kategori, yaitu :
- a) Aktor primer,
 - b) Aktor sekunder,
 - c) Aktor tersier,
 - d) Aktor kwarter.
- 3) Mengidentifikasi faktor yang menyebabkan peran aktor dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari belum berjalan secara optimal. Identifikasi dilakukan dengan melihat faktor pendukung dan penghambat suatu produk wisata yang biasanya berwujud sistem destinasi pariwisata akan terdiri atau menawarkan paling tidak beberapa komponen pokok sebagai berikut :
- 1) Faktor Pendukung.
 - a. Daya tarik wisata yang bisa berbasis utama pada alam, budaya atau minat khusus
 - b. Akomodasi atau amenitas, aksesibilitas dan transportasi (udara, darat, dan laut)
 - c. Fasilitas umum
 - d. Fasilitas pendukung pariwisata

e. Masyarakat sebagai tuan rumah (*host*) dari suatu destinasi.

2) Faktor Penghambat

c. Belum dikelolanya dengan baik oleh pihak pemerintah yang berwenang dan belum tertatanya dengan baik aspek prasarana dan sarana yang sebenarnya dapat dijadikan daya dukung untuk pengembangan objek wisata di daerah.

d. Keterbatasan prasarana dan sarana serta pengelolaan terhadap potensi wisata masih belum optimal. Hal tersebut merupakan dampak dari kurangnya alokasi anggaran dana yang diperuntukkan bagi pengembangan sektor pariwisata.

Tabel 1. 9 Fenomena Penelitian

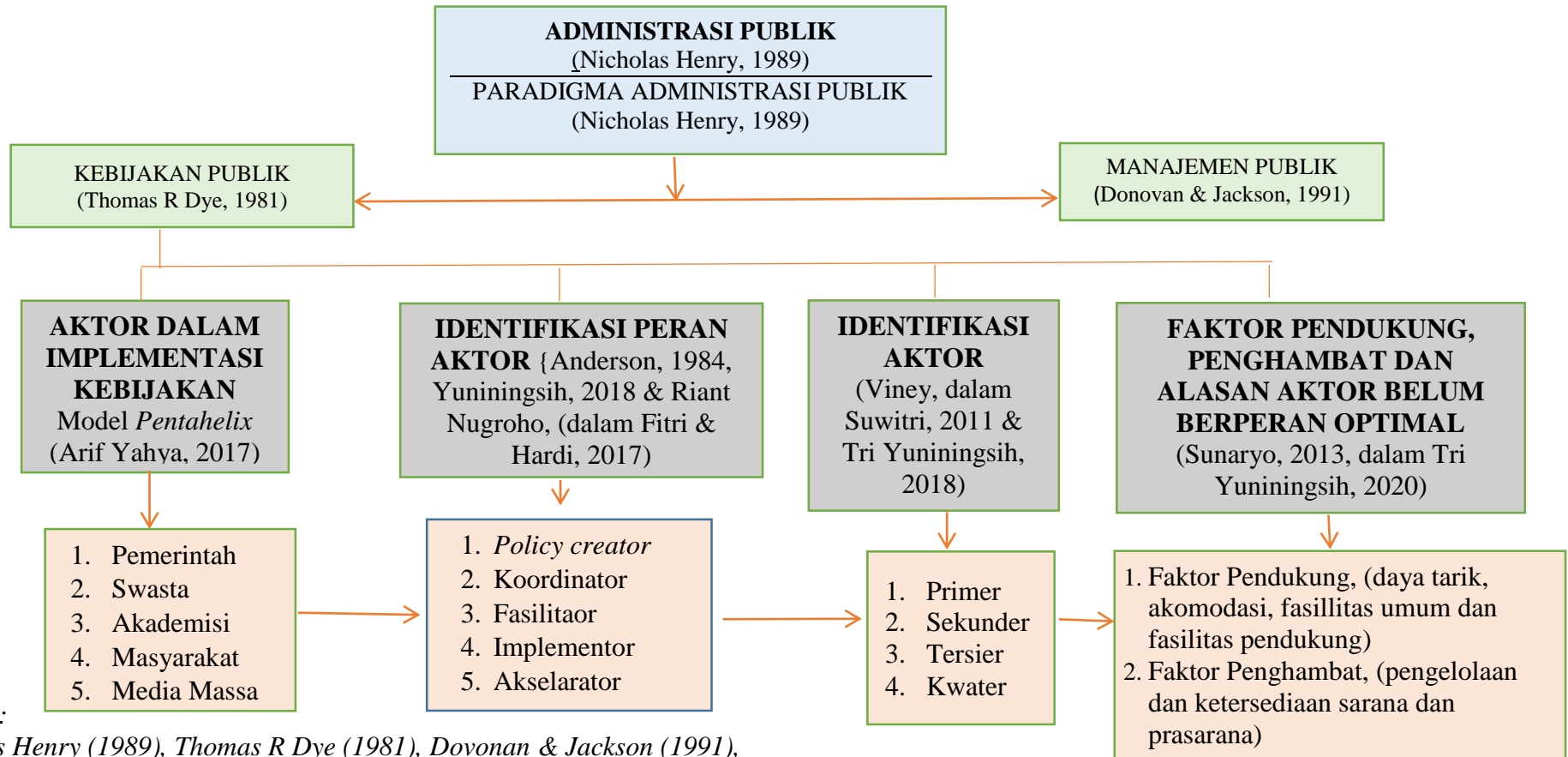
No.	Fenomena	Gejala yang Diamati	Sub Gejala	Pertanyaan
1	Identifikasi aktor yang terlibat dalam tahapan implementasi pengembangan desa wisata.	<p>Pemerintah, yaitu birokrasi yang dipandang sebagai agen administrasi yang paling bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Peran pemerintah sebagai pembuat regulasi/kebijakan. – Peran pemerintah dalam menjalankan kebijakan/program. – Peran pemerintah dalam mengawasi kebijakan/program yang berjalan. 	1. Bagaimana peran pemerintah dalam tahapan implementasi pengembangan Desa Wisata Limbasari ?
		<p>Swasta, yaitu aktor yang berperan sebagai <i>entrepreneur</i> yang harus dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis untuk mencapai tujuan bisnis yaitu : <i>profit, people, planet, sustainability</i> serta tumbuh dan berkembang dari skala mikro, kecil, menengah, dan besar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Peran swasta dalam permodalan. – Peran swasta dalam menjalankan usaha pariwisata. – Peran swasta terhadap masyarakat. 	2. Bagaimana peran pihak swasta dalam tahapan implementasi pengembangan Desa Wisata Limbasari ?
		<p>Masyarakat, yaitu kelompok-kelompok atau komunitas yang ada di masyarakat yang berusaha mempengaruhi berbagai peraturan implementasi seperti pedoman acuan atau regulasi-regulasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Peran masyarakat dalam membuat regulasi. – Peran masyarakat dalam menjaga lingkungan desa wisata 	3. Bagaimana peran masyarakat dalam tahapan implementasi pengembangan Desa Wisata Limbasari ?

			– Peran masyarakat sebagai implementor kebijakan	
		Akademisi , yaitu aktor yang berperan penting dalam mengkaji kebijakan dengan melakukan penelitian sesuai dengan ilmu yang dikuasainya.	– Peran akademisi dalam merumuskan kebijakan. – Peran akademisi dalam ilmu pengetahuan, khususnya tentang kepariwisataan	4. Bagaimana peran akademisi dalam tahapan implementasi pengembangan Desa Wisata Limbasari ?
		Media Massa , merupakan penghubung penting antara negara dan masyarakat, perpaduan reporter pasif dan analis aktif memiliki tempat tersendiri dalam proses kebijakan publik untuk memberikan ruang bagi pemerintah dan masyarakat dalam memahami masalah sosial sekaligus untuk memecahkan permasalahan sosial tersebut	– Peran media massa dalam mempromosikan desa wisata. – Peran media massa sebagai tempat menyalurkan ide dan inovasi.	5. Bagaimana peran media massa dalam tahapan implementasi pengembangan Desa Wisata Limbasari ?
2	Analisis peran aktor yang terlibat dalam tahapan implementasi pengembangan desa wisata.	Policy creator , pemangku kepentingan yang berfungsi selaku pengambil keputusan serta penentu suatu kebijakan.	– Tugas dan fungsi aktor – Posisi dan kedudukan setiap aktor – Peran aktor dalam proses pembuatan sebuah kebijakandalam pengembangan	6. Bagaimana proses pembuatan kebijakan dan siapa saja aktor yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari ?

		pariwisata di Desa Wisata Limbasari	
	Koordinator , pemangku kepentingan yang berfungsi mengkoordinasikan pemangku kepentingan terpaut lainnya	<ul style="list-style-type: none"> – Tugas dan fungsi aktor – Posisi dan kedudukan setiap aktor – Peran aktor dalam melakukan koordinasi dengan aktor lain dalam pengembangan desa wisata 	7. Bagaimana proses koordinasi yang dijalankan dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari ?
	Fasilitator , pemangku kepentingan yang berfungsi untuk memadai serta memenuhi kebutuhan kelompok sasaran.	<ul style="list-style-type: none"> – Tugas dan fungsi aktor – Posisi dan kedudukan setiap aktor – Peran aktor dalam memfasilitasi aktor lain dalam mengembangkan pariwisata 	8. Bagaimana peranan yang dilakukan dalam rangka menjembatani setiap kepentingan aktor lain dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari ?
	Implementor , pemangku kepentingan yang melakukan kebijakan terhitung kelompok sasaran	<ul style="list-style-type: none"> – Tugas dan fungsi aktor – Posisi dan kedudukan setiap aktor – Peran aktor dalam melaksanakan kebijakan yang sudah di tetapkan dalam pengembangan pariwisata 	9. Bagaimana peranan aktor dalam melaksanaka kebijaka yang telah ditetapkan dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari ?
	Akselarator , pemangku kepentingan yang berfungsi dalam percepatan	<ul style="list-style-type: none"> – Tugas dan fungsi aktor 	10. Bagaimana peranan aktor dalam usaha untuk

		serta berkontribusi supaya program bisa berjalan sesuai dengan tujuan, apalagi bisa menggapai tujuan dengan lebih cepat.	<ul style="list-style-type: none"> – Posisi dan kedudukan setiap aktor – Peran aktor dalam berkontribusi untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan yang ada dalam pengembangan pariwisata 	mempercepat pelaksanaan kebijakan pengembangan Desa Wisata Limbasari ?
4	Identifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan desa wisata serta alasan mengapa peran aktor belum optimal.	Faktor Pendukung , (daya tarik, akomodasi, fasilitas umum dan fasilitas pendukung)	<ul style="list-style-type: none"> – Daya tarik wisata yang dimiliki. – Akomodasi menuju tempat wisata. – Fasilitas yang disediakan di tempat wisata. 	<p>11. Apa yang menjadi daya tarik wisata di Desa Wisata Limbasari ?</p> <p>12. Apa saja yang menjadi bagaimana akomodasi dan fasilitas yang tersedia di Desa Wisata Limbasari ?</p>
		Faktor Penghambat , meliputi pengelolaan yang kurang baik dan ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai	<ul style="list-style-type: none"> – Pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun aktor lain yang terlibat. – Sarana dan prasarana yang tersedia. 	<p>13. Bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun aktor lain dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari ?</p> <p>14. Bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia dalam Desa Wisata Limbasari ?</p>

Gambar 1. 2 Kerangka Pikir Teoritis



Sumber :

Nicholas Henry (1989), Thomas R Dye (1981), Donovan & Jackson (1991), Arif Yahya (2017), Viney dalam Suwitri (2011), Yuniningsih (2020), Anderson, 1984, Yuniningsih, 2018 & Riant Nugroho, (dalam Fitri & Hardi, 2017)

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Desain Penelitian

Suatu penelitian terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian dengan judul “Analisis Peran Aktor dalam Implementasi Pengembangan Desa Wisata Limbasari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga” ini menggunakan perspektif penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2012:6) merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini juga dilakukan secara ilmiah, apa adanya serta tidak dimanipulasi dan penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu melakukan reinterpretasi tentang keadaan fenomena sosial yang terdapat pada permasalahan yang diteliti. Selain itu menurut Marshal dalam Sarwono (2006:193) mengemukakan bahwa “penelitian kualitatif sebagai proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia”. Lalu metode deskriptif menurut Nazir (2013:43), menjelaskan “metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.”

Desain penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan yang ada di lapangan dengan menjelaskannya dan menghubungkan sebab akibat masalah tersebut terjadi

untuk memperoleh gambaran realitas mengenai bagaimana peran aktor dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari.

1.8.2. Situs Penelitian

Peneliti menentukan situs penelitian atau lokasi penelitian di Desa Limbasari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu atau kelompok yang memiliki peran sebagai informan dalam memberikan informasi yang terkait fenomena yang akan di teliti. Informan dalam penelitian ini adalah individu atau kelompok yang harus memahami tentang situasi atau kondisi dari latar penelitian dengan kata lain merupakan ahli di bidangnya masing-masing. Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan yang diperlukan demi mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Adapun informan dari penelitian ini yaitu *Stakeholders* yang terlibat langsung dan mengetahui secara mendalam mengenai pengembangan Desa Wisata Limbasari yaitu :

1. Kepala Bidang Pariwisata Dinporapar Kabupaten Purbalingga.

Peneliti memilih informan ini karena memiliki tugas pokok dan fungsi secara langsung dalam mengimplementasikan program pengembangan desa wisata di Kabupaten Purbalingga.

2. Kepala Bidang PMD Kecamatan Bobotsari. Informan ini dipilih karena kewenangan dan tugasnya yang mencakup fokus dan lokus penelitian.
3. Kepala Desa Limbasari. Peneliti memilih informan ini karena kepala desa merupakan pemegang kekuasaan dan wewenang terdekat dan tertinggi di lokasi penelitian, yaitu di Desa Limbasari.
4. Ketua Pokdarwis di Desa Wisata Limbasari. Peneliti memilih ketua kelompok sadar wisata di Desa Wisata Limbasari Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.
5. PKK Desa Limbasari. Peneliti memilih kelompok PKK karena kelompok ini memiliki peran aktif dalam pengembangan pariwisata di Desa Limbasari.
6. Tim Pengabdian Masyarakat Unsoed. Informan ini dipilih karena peranannya yang muncul dalam Pengembangan Desa Wisata Limbasari.
7. Masyarakat. Masyarakat di sini merupakan warga Desa Wisata Limbasari sekaligus pelaku kegiatan pariwisata.

1.8.4. Jenis Data

Menurut pakar Lofland dalam Moelong (2007:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini sendiri jenis-jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Kata-kata dan Tindakan

Kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara menjadi sumber data utama. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti harus melihat kondisi dari model jaringan serta peran aktor yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari sehingga dapat diketahui gejala apa saja yang muncul.

b. Sumber Tertulis

Sumber data utama terkadang tidak dapat memenuhi kebutuhan data dari penulis, tak jarang si penulis akhirnya mencari data tambahan dari sumber tertulis. Jika dilihat dari segi sumber data, data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat di bagi ke dalam bentuk sumber buku dan majalah ilmiah, koran atau surat kabar, tabloid, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

c. Foto

Seiring dengan berkembangnya zaman, penggunaan teknologi dalam penelitian semakin besar. Foto yang didapat saat melakukan penelitian bisa menjadi sumber data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif yang diteliti.

d. Data Statistik

Dalam penelitian kualitatif, data statistik sering juga di gunakan sebagai data tambahan. Data statistik tersebut dapat membantu memberi gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian. Penggunaan data statistik tersebut diharapkan menjadi pengantar dan mengarahkan penulis pada kegiatan dan peristiwa yang ditemukan dan di

cari sendiri sesuai dengan masalah dan tujuan penelitiannya. (Moleong, 2007: 157-162).

1.8.5. Sumber Data

Penelitian dengan judul “Analisis Peran Aktor Implementasi Pengembangan Desa Wisata Limbasari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga” ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Data primer,

Menurut Sugiyono (2006:137), “Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data yang diperoleh merupakan data yang diolah sendiri atau diperoleh langsung dari objeknya. Data yang diperoleh berupa jawaban atas daftar pertanyaan yang ada dilakukan selama proses wawancara. Dalam hal ini data yang diperoleh merupakan data yang didapat dari hasil wawancara dengan subjek penelitian yaitu Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga, Kepala Desa Limbasari, Ketua Pokdarwis Desa Wisata Limbasari Ketua PKK Desa Limbasari dan masyarakat.

2. Data sekunder, menurut Sugiyono (2006:137), merupakan “Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Tidak langsung di sini memiliki maksud bahwa data yang diperoleh merupakan data yang bersumber dari objek atau dengan menggunakan dokumen-dokumen, buku, dan artikel pendukung lainnya. Dalam hal ini, data

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan regulasi serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran aktor dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu metode yang dilakukan guna memperoleh data dari sumber data dengan cara melakukan sesi tanya jawab secara lisan atau bertatap muka secara langsung maupun tidak langsung. Moleong (1993:135) mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Adapun wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, artinya dalam wawancara ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetapi masih tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang mendalam dan tidak kaku. Selain itu dalam pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dengan beberapa *stakeholders* kunci diantaranya dari pihak Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga, Pengelola Desa Wisata/ POKDARWIS (kelompok sadar wisata) Desa Limbasari,

pihak Kantor Desa Limbasari, Ketua RW, pihak PKK, dan beberapa dari pihak Masyarakat Desa Limbasari.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis kejadian-kejadian yang diselidiki. Menurut Mardalis (1995:63) metode observasi adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diingingkan, atau suatu studi yang sengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti bisa direalisasikan dengan cara mencatat berupa informasi yang berhubungan dengan peran aktor dalam tahapan implementasi pengembangan Desa Wisata Limbasari. Dengan observasi tersebut penulis dapat memahami konteks data dalam berbagai pandangan. Untuk itu peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung dalam mendapatkan bukti data yang terkait dengan objek penelitian.

3. Metode Dokumentasi

Yaitu kegiatan melihat kembali sumber-sumber data dari dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data-data yang telah ditemukan. Metode dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari

seseorang. Didalam memakai metode dokumentasi penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan fokus penelitian.

4. Studi kepustakaan

Merupakan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan jurnal. Studi kepustakaan yang digunakan peneliti seperti artikel, buku, dan jurnal yang berhubungan dengan peran aktor dalam implementasi kebijakan pengembangan desa wisata.

1.8.7. Analisis dan Intepretasi Data

Menurut Bungin (2007:154), “Analisis data adalah gambaran atau informasi tentang peristiwa atas objek yang dikaji tetap mempertimbangkan derajat koherensi internal, masuk akal, dan berhubungan dengan peristiwa faktual dan realistik”.

Analisis data merupakan bagian sangat penting di mana bagian ini merupakan bagian proses dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan induktif. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber bermacam-macam maka teknik analisis yang digunakan mengacu pada Burhan Bungin pada bukunya yang berjudul “Analisis Data Penelitian Kualitatif” yaitu teknik analisis komponensial dan teknik analisis taksonomi.

Teknik analisis komponensial digunakan untuk menganalisis adanya unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan yang kontraks antara satu dengan yang lainnya. Teknik ini dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu:

1. Pembedahan hasil wawancara dan observasi,

Hal ini dilakukan dengan cara membahas hasil wawancara dan observasi dalam sebuah lembaran yang mudah dibaca. Dalam tahap ini hasil wawancara dan observasi belum perlu dikelompokkan dan peneliti hanya perlu melakukan pembedahan hasil wawancara dan observasi tersebut.

2. Pemilihan hasil wawancara dan observasi,

Dalam tahap ini baru dilakukan pemilihan berdasarkan sub-babnya masing-masing.

3. Menemukan perbedaan dan permasalahan,

Tahap ini membuat tabel tertentu untuk mencari dan menempatkan permasalahan atau kontras yang terlihat dari hasil observasi dan wawancara.

Lalu, teknik selanjutnya yaitu menggunakan teknik analisis taksonomi dimana teknik ini merupakan teknik analisis dengan melihat domain atau suatu indikator yang kemudian memiliki sub-sub bagian yang lebih khusus dan lebih rinci namun masih tetap dalam satu rumpun.

Selain itu adapun metode analisis oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:247) yang menyebutkan bahwa terdapat tiga aktivitas dalam analisis data yang terjadi bersamaan, yaitu :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data), diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan

transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan tertulis dilapangan. Tahap ini merupakan awal dari analisis data.

2. *Data Display* (Penyajian Data), sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian berupa uraian singkat dan hubungan antar teori
3. *Conclusion Drawing / Verivication* (Menarik Kesimpulan), suatu kegiatan mencari arti benda – benda, mencatat keturunan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi – konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan merupakan hipotesis dari adanya masalah dalam penelitian

1.8.8. Kualitas Data

Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan bentuk penjelasan secara kalimat atau deskripsi dengan temuan data dikatakan valid atau terpercaya apabila tidak lagi terdapat keraguan akan objek yang diteliti. Menurut Moleong (2012:324) menyebutkan bahwa terdapat empat kriteria keabsahan data yang akan mempengaruhi kualitas data, antara lain yaitu kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergatungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

Menurut Moleong dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif” terdapat teknik pemeriksaan standar keabsahan suatu data, di mana peneliti mengamnbil teknik triangulasi yang digunakan untuk teknik analisis data yang dapat dilakukan dengan cara:

1. Mengajukan berbagai pertanyaan dengan macam variasi;
2. Melakukan pengecekan data dengan berbagai sumber;

3. Memanfaatkan berbagai metode dengan harapan kepercayaan terhadap data lebih tinggi.

Teknik ini mengutamakan sebuah keefektifan proses dan hasil yang ditargetkan. Teknik ini juga menguji adanya kesesuaian antara metode dengan proses yang berjalan selama pengambilan data. Analisis data menggunakan metode triangulasi dilakukan secara terus-menerus selama penelitian dan proses pengumpulan data. Menurut Moleong (2012:33), triangulasi merupakan “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.”

Langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan teknik triangulasi mengutip dalam Moleong (2012:331) yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Menurut Sugiyono (2006:273), terdapat tiga jenis macam teknik triangulasi. Adapun ketiga jenis tersebut yaitu triangulasi sumber data, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu pengumpulan data dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan pengujian dengan cara pengecekan data yang diperoleh selama penelitian oleh beberapa sumber;
2. Triangulasi teknik, merupakan teknik triangulasi dengan melakukan pengujian dengan cara pengecekan data yang sama namun dengan menggunakan alat yang berbeda;
3. Triangulasi waktu, merupakan teknik triangulasi yang digunakan dengan mengumpulkan dan melakukan pengecekan dalam waktu atau situasi yang berbeda untuk melihat hasil yang ada.

Dalam penelitian ini, uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber, dengan maksud peneliti tidak hanya mencari sumber informasi dengan mewawancarai satu informan saja, melainkan melakukan wawancara dengan orang yang berbeda tetapi masih sesuai dengan kriteria informan yang akan di wawancarai guna memperoleh informasi yang benar sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Setelah itu memastikan kebenaran atau validitas data dengan menganalisis data hasil wawancara dengan kondisi dilapangan dengan cara observasi dan juga dokumentasi.